



FORUM  
SINGOLOGI  
INDONESIA  
DRAGON

INDONESIA AND PALATIAN POUARD  
TUMBUH USA



# BAGIAN I

RRT, ASIA TENGGARA, DAN INDONESIA:  
REFLEKSI PERKEMBANGAN 2025



# **RRT, Asia Tenggara, dan Indonesia Sepanjang 2025: Sebuah Pengantar**

Johanes Herlijanto dan Abdullah Dahana

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan sebuah negara yang memiliki arti sangat penting bagi kawasan Asia Tenggara, sebuah kawasan di mana negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada. Perkembangan internal yang berlangsung di negara tersebut sangat berpengaruh terhadap kawasan ini, mengingat hubungan ekonomi yang sangat kuat antara RRT dan negara-negara ASEAN, khususnya dalam dua dasawarsa terakhir. Sementara itu, dalam berbagai aspek di luar ranah ekonomi, perilaku internasional negara tersebut membawa dampak yang cukup besar bagi kawasan Asia Pasifik, termasuk bagi negara-negara ASEAN.

Arti penting RRT di atas menyebabkan tingginya perhatian dari pihak negara-negara ASEAN terhadap berbagai perkembangan termutakhir terkait negara yang sejak awal abad ke-21 dijuluki sebagai Raksasa Baru Asia itu. Pemerintah, komunitas akademik, serta lembaga-lembaga penelitian di negara-negara ASEAN berupaya memantau dan menganalisis berbagai perkembangan yang terjadi di RRT untuk mengantisipasi keterkaitannya

dengan situasi di Asia Tenggara. Sebagai negara Asia Tenggara terbesar yang memiliki dinamika relasi yang kompleks dengan RRT, Indonesia pun turut berkepentingan untuk memantau berbagai hal yang terjadi di negara terbesar di kawasan Asia Pasifik tersebut. Laporan akhir tahun berjudul “RRT, Asia Tenggara, dan Indonesia: Refleksi Perkembangan 2025” ini merupakan salah satu upaya kecil dari sekelompok pemerhati Tiongkok di Indonesia untuk berpartisipasi dalam memantau, memahami, dan menganalisis apa yang terjadi di negeri itu, khususnya sepanjang tahun 2025, serta keterkaitannya dengan Asia Tenggara dan Indonesia.

Tahun 2025 bukan sekadar tahun yang biasa bagi RRT. Negara itu masih berupaya untuk memperbaiki performa ekonomi yang dalam beberapa tahun sebelumnya mengalami berbagai tantangan akibat ketidakseimbangan struktural yang dalam, yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.<sup>1</sup> Tantangan ekonomi RRT makin menguat akibat pandemi Covid-19, kebijakan nir-COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah hingga 2022, serta upaya pemulihan yang belum membawa hasil hingga tahun-tahun sesudahnya.<sup>2</sup> Situasi di atas

---

<sup>1</sup> Ho-fung Hung, "China's Long Economic Slowdown," *Dissent*, vol. 72 no. 2, 2025, pp. 103-109, <https://dx.doi.org/10.1353/dss.2025.a960002>.

<sup>2</sup> Kerry Liu, “Understanding the Post-COVID Chinese Economy,” *International Review of Applied Economics*, vol. 39, issue 1, 2025, <http://dx.doi.org/10.1080/02692171.2024.2404883>.

diperparah oleh adanya kebijakan *de-risking* ‘pengurangan risiko’ dan *decoupling* ‘pelepasan ketergantungan’ yang dicanangkan oleh negara-negara Barat untuk perbaikan perimbangan perdagangan antara mereka dan RRT.<sup>3</sup> Pada saat yang sama, RRT juga menghadapi berbagai ketidakpastian yang secara global membayangi masyarakat internasional pada tahun itu.<sup>4</sup> Di sisi lain, meski masih berjuang menghadapi tantangan internal, RRT justru meningkatkan upaya untuk memperkuat posisinya baik dalam dunia internasional maupun pada tataran regional. Yang belakangan ini diwujudkan dengan berbagai strategi untuk menanamkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, baik pada aspek diplomasi secara umum maupun secara khusus pada aspek pertahanan dan keamanan.<sup>5</sup> Sementara dalam aspek

---

<sup>3</sup> Untuk penjelasan sederhana mengenai *decoupling* dan *de-risking*, lihat Yuan Yujing, “The Three Levels Of Decoupling With China: Governments, Businesses, Market,” Eurasia Review, 17 Mei 2023, tersedia daring <https://www.eurasiareview.com/17052023-the-three-levels-of-decoupling-with-china-governments-businesses-market-analysis> (diakses 31 Desember 2025); Emily Benson dan Gloria Sicilia, “A Closer Look at Derisking,” Center for Strategic and International Studies, 20 Desember 2023, tersedia daring <https://www.csis.org/analysis/closer-look-de-risking> (diakses 31 Desember 2025).

<sup>4</sup> Alicia Garcia-Herrero, “China’s Economy in 2025: Headwinds, Uncertainty, and the Trump Factor,” Choice, 19 December 2024, tersedia daring <https://chinaobservers.eu/chinas-economy-in-2025-headwinds-uncertainty-and-the-trump-factor/> (diakses 31 Desember 2025).

<sup>5</sup> Sense Hofstede, “China’s Overtures to Southeast Asia: Xi Takes the Lead,” Fulcrum, 27 August 2025, tersedia daring

ekonomi, hubungan RRT dan negara-negara ASEAN tetap mengalami berbagai dinamika sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai perkembangan di atas menjadikan tahun 2025 sebuah periode yang menarik bagi upaya mengamati, merefleksikan, menganalisis, serta menarik pelajaran terkait perkembangan internal dan hubungan antara RRT dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perkembangan internal apa yang perlu kita garisbawahi pada periode di atas? Upaya diplomasi apa yang RRT jalankan dalam upaya memperkuat pengaruh negara itu di Asia Tenggara? Bagaimana sepak terjang RRT di kawasan Asia Tenggara dalam aspek keamanan? Perkembangan apa yang penting untuk dicatat dalam hubungan ekonomi antara RRT dan Asia Tenggara? Serta bagaimana kita menelusuri secara khusus hubungan RRT dan Indonesia dalam pendekatan sejarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pemantik bagi pembahasan yang disajikan oleh para penulis laporan ini.

Seperti diyakini oleh cukup banyak ahli hubungan internasional, politik luar negeri sebuah negara sering kali

---

<https://fulcrum.sg/chinas-overtures-to-southeast-asia-xi-takes-the-lead/> (diakses 31 Desember 2025); Kevin Zongzhe Li, "China's Neighborhood Diplomacy Comes of Age in Southeast Asia," *The Diplomat*, 4 September 2025, tersedia daring <https://thediplomat.com/2025/09/chinas-neighborhood-diplomacy-comes-of-age-in-southeast-asia/> (diakses 31 Desember 2025).

berkaitan erat dengan situasi dalam negeri negara itu.<sup>6</sup> Sesuai pandangan tersebut, laporan ini diawali dengan pembahasan mengenai beberapa perkembangan penting yang terjadi di dalam negeri RRT yang ditulis oleh Ignatius Edhi Kharitas dan Muhammad Farid. Tulisan tersebut diawali dengan sebuah hal menarik terkait cara para pemimpin tertinggi RRT menyampaikan penilaian mereka terhadap situasi yang sedang dihadapi negara itu. Bila pada tahun-tahun sebelumnya para pemimpin RRT cenderung menyampaikan jaminan kepada masyarakat bahwa kondisi negara pascapandemi Covid-19 kian membaik, di tahun 2025 lalu, para pemimpin secara terbuka menyatakan kepada publik bahwa terdapat tantangan dan risiko yang sedang negeri mereka hadapi. Keterbukaan ini memperlihatkan bahwa kondisi RRT sebenarnya tidak sedang dalam keadaan terbaik.

Memang, para pemimpin negara itu juga menyampaikan bahwa mereka tengah berupaya menemukan solusi bagi segenap permasalahan yang tengah dihadapi Tiongkok, salah satunya adalah upaya menciptakan peluang

---

<sup>6</sup> Misalnya, Robert D. Putnam, "Diplomacy and domestic politics: the logic of two level games," *International Organization*, 42, 3., Summer 1988; Kenneth Schultz, K, "Domestic politics and international relations," dalam *Handbook of International Relations*, diedit oleh W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons., hlm. 478-502, (SAGE Publications Ltd., 2013); Hiro Katsumata & Daiki Shibuichi, "Japan in the Indo-Pacific: domestic politics and foreign policy," *The Pacific Review*, 36(2), 2023, pp. 305–328, <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160795>.

ekonomi baru melalui sektor-sektor teknologi terkini. Selain menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang sedang dihadapi RRT, upaya di atas juga merupakan perwujudan ambisi RRT untuk bertransformasi dari “pabrik manufaktur dunia” menuju “pusat produksi teknologi.” Namun, sebagaimana disampaikan oleh Kharitas dan Farid, upaya transformasi menuju pusat produksi berbasis teknologi tinggi itu belum dapat menjawab problem terkait pengangguran yang saat ini masih menghadirkan sebuah tantangan serius bagi pemerintah RRT. Lagi pula, selain pengangguran, RRT masih menghadapi berbagai tantangan lainnya dalam aspek ekonomi, seperti meningkatnya persaingan yang ketat dalam dunia usaha—sebuah fenomena yang disebut sebagai “involusi”—serta tren penurunan harga (deflasi) sebagai akibat dari persaingan tersebut. Tantangan-tantangan yang seolah membentuk problem dalam negeri RRT itu pada gilirannya membawa dampak yang sangat penting bagi kawasan Asia Tenggara.

Selain perkembangan dalam negeri, diplomasi politik RRT di tahun 2025 lalu juga menjadi topik bahasan yang menarik dan penting. Seperti dicatat oleh Ratih W. Kabinawa dan Johannes Herlijanto pada bagian berikutnya dari laporan ini, tahun 2025 menjadi momentum bagi RRT untuk memperkuat pengaruh ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Tenggara. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh Presiden Xi Jinping sejak periode awal

pemerintahannya. Upaya meningkatkan pengaruh tersebut menempatkan ASEAN bukan lagi sekadar mitra perdagangan, tetapi sebagai poros utama diplomasi RRT. Hal ini terlihat antara lain dalam keterlibatan aktif dan peran sentral RRT dalam sejumlah inisiatif multilateral yang melibatkan ASEAN, seperti dalam keterlibatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Trilateral Gulf Cooperation Council (GCC)—ASEAN—Tiongkok di Kuala Lumpur pada 27 Mei 2025. RRT juga dinilai berperan dalam penerimaan Timor-Leste secara resmi sebagai anggota ASEAN ke-11, melalui dukungan politik yang kuat. Hal yang terakhir ini pada gilirannya akan meningkatkan pengaruh RRT pada ASEAN, mengingat hubungan baik antara RRT dan Timor-Leste. Meski demikian, upaya RRT memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara masih terganjal oleh beberapa tantangan, salah satunya adalah isu Laut Cina Selatan (LCS) yang masih menjadi sebuah tantangan utama.

Pada tataran bilateral, di tahun 2025 RRT memperkenalkan format dialog bilateral baru dengan negara-negara ASEAN, yaitu mekanisme “2+2” yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari dua negara. Yang menarik, Indonesia menjadi negara pertama yang digandeng Beijing untuk melaksanakan mekanisme “2+2” itu. Sambutan dan kesediaan Indonesia untuk mewujudkan dialog “2+2” tingkat menteri pertama antara RRT dan sebuah negara

ASEAN tentu memiliki arti strategis bagi kedua pihak. Namun, bagi Indonesia, perwujudan dialog di atas serta peningkatan hubungan dengan RRT melalui berbagai mekanisme lainnya menghadirkan pula tantangan dan risiko yang tak dapat dianggap remeh. Tantangan dan risiko tersebut bahkan bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara ASEAN yang lain.

Perkembangan dalam aspek keamanan juga menjadi topik yang sangat penting untuk diamati. Dalam laporan ini, perkembangan aspek keamanan dan pertahanan RRT di sepanjang tahun 2025 menjadi fokus dari tulisan Ristian Atriandi Supriyanto. Sebagaimana dicatat dalam tulisan tersebut, penerbitan Buku Putih Keamanan yang menerangkan kebijakan umum pertahanan dan keamanan RRT, termasuk terhadap Asia Tenggara, pada Mei tahun lalu merupakan salah satu pokok bahasan yang menarik dan penting. Selain itu, menurut Supriyanto, penting pula bagi kita di Indonesia untuk memperhatikan peluncuran “Prakarsa Tata Kelola Global” (*Global Governance Initiative/GGI*) pada September tahun yang sama. Yang menarik, prakarsa tersebut berfokus pada “pembangunan sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata serta kerja sama untuk komunitas dengan masa depan bersama untuk umat manusia” (*community with a shared future for mankind*). Menurut Supriyanto, fokus di atas memperlihatkan pandangan Beijing bahwa tata kelola

global yang saat ini berlaku masih belum adil, setidaknya bagi kepentingan RRT. Dengan menekankan sebuah tata kelola global yang mengedepankan kesetaraan kedaulatan, Beijing berharap memperoleh kebebasan untuk menyelesaikan urusan dalam negerinya, termasuk menyelesaikan permasalahan Taiwan yang Beijing anggap sebagai urusan internal, serta memiliki hak untuk menegakkan kewenangan dan dominasi PKC sebagai “sistem sosial” dalam sistem demokrasi partai tunggal.

Pandangan dan harapan RRT di atas nampaknya diejawantahkan dalam berbagai tindakan Beijing baik di Asia Timur maupun Asia Tenggara. Dalam wilayah maritim di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, RRT terlibat ketegangan yang bahkan mengarah pada konflik dengan beberapa negara, termasuk Jepang dan Filipina. Meski ketegangan di wilayah maritim itu belum berkembang menjadi sebuah konflik bersenjata, Supriyanto mencatat bahwa terjadi “eskalasi horizontal”, di mana ketegangan tersebut berkembang dengan melibatkan pihak-pihak lain sehingga menjadi lebih luas. Di sisi lain, ketika terjadi sebuah konflik yang mengalami “eskalasi vertikal” di Asia Tenggara, yaitu antara Tailan dan Kamboja, Beijing merespons dengan mengedepankan netralitasnya. Menurut Supriyanto, sikap ini dapat dipahami sebagai “netralitas semu” karena sebenarnya RRT memiliki kekuatan untuk bertindak lebih demi menciptakan perdamaian. Dengan latar belakang harapan

Beijing terhadap tata kelola global yang lebih berpihak pada kepentingannya, serta berbagai perilaku RRT baik di kawasan maritim maupun terkait konflik di daratan Asia Tenggara di atas, Supriyanto menganalisis keputusan Indonesia untuk menjajaki diplomasi pertahanan dengan RRT pada tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, diplomasi pertahanan dengan RRT berpeluang menjadi sarana dialog Indonesia untuk membicarakan kepentingan dan prioritas keamanan yang berbeda, bahkan berlawanan, dengan Beijing tanpa menyulut ketegangan baru dalam hubungan bilateral. Namun, Supriyanto juga mengingatkan potensi tantangan yang muncul dari hubungan diplomasi pertahanan tersebut. Antara lain, Tiongkok semakin percaya diri dalam merebut kepentingan geopolitiknya, terutama di Laut Cina Selatan.

Tentu saja, ekonomi pun menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan secara khusus ketika membicarakan RRT dan hubungannya dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Aspek ini dibahas oleh Muhamad Iksan dan Muhammad Farid dalam tulisan bersama yang menjadi bagian dari laporan ini. Dalam tulisan tersebut, keduanya mengangkat perkembangan hubungan RRT dan Asia Tenggara hingga tahun 2023 sebagai latar belakang bagi pembahasan yang lebih khusus mengenai hubungan RRT dan Indonesia di tahun 2025. Khusus bagi hubungan RRT dan Indonesia, kedua penulis mengangkat dua kasus yang menjadi pembicaraan publik di tahun 2025 dan berpotensi

mempengaruhi hubungan kedua negara dalam aspek ekonomi, yaitu kasus pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta—Bandung, yang masih menyisakan persoalan hingga tahun 2025 yang lalu, meski telah beroperasi sejak tahun 2023, dan moratorium pemberian Izin Usaha Industri (IUI) baru bagi smelter nikel yang hanya memproduksi *Nickel Pig Iron* (NPI), feronikel, nikel matte, atau *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP). Namun, tulisan Iksan dan Farid juga menyoroti adanya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hubungannya dengan RRT, khususnya ketergantungan yang tinggi terhadap RRT dalam bidang perdagangan, utamanya ekspor, penanaman modal asing, serta rantai pasok industri. Dalam pandangan kedua penulis, Indonesia harus bisa mengurangi ketergantungan pada aspek-aspek di atas, antara lain dengan melakukan diversifikasi. Di sisi lain, kedua penulis berpandangan bahwa Indonesia perlu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan kesalingtergantungan (*interdependency*) dengan RRT. Bila ini dilakukan, maka hubungan ekonomi antara kedua negara akan terus menjadi peluang yang menguntungkan bagi Indonesia.

Rangkaian laporan mengenai RRT dan hubungannya dengan Asia Tenggara dan Indonesia ini ditutup dengan tinjauan historis hubungan RRT dan Indonesia yang ditulis oleh R. Tuty Nur Mutia. Dalam tulisan penutup tersebut, guru besar ilmu sejarah pada Program Studi

Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia itu menempatkan hubungan RI—RRT pada tahun 2025 dalam konteks sejarah panjang hubungan kedua negara yang dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dalam penelusuran Mutia, sejarah hubungan Indonesia dan RRT tak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain terkait kehadiran masyarakat Tionghoa di Indonesia, kecurigaan elit pemerintah—khususnya di zaman pemerintahan Orde Baru (Orba)—terhadap keterlibatan RRT dalam politik dalam negeri Indonesia di masa lalu, serta permasalahan terkait perbedaan ideologi kedua negara. Berbagai tantangan tersebut mencapai puncaknya pada paruh kedua tahun 1960-an, ketika kedua negara memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik pada 1967. Namun, seperti disampaikan oleh Mutia, sejak Indonesia menormalisasi kembali hubungan diplomatik dengan RRT, karakter hubungan kedua negara mengalami perubahan yang signifikan. Hubungan kedua negara meningkat secara drastis, khususnya pada aspek ekonomi, yang meliputi perdagangan dan investasi.

Memasuki periode kepemimpinan Presiden Prabowo, dalam catatan Mutia, Indonesia mengembangkan sikap pragmatis namun tetap terukur dalam hubungan dengan RRT. Sikap ini diimbangi dengan upaya mempertahankan ketegasan, khususnya dalam hal kedaulatan. Selain itu, menurut Mutia, Indonesia mengadopsi strategi *hedging* yang terlihat dari upaya mempertahankan keseimbangan

antara kedekatan dengan RRT dan kedekatan dengan berbagai pihak lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan di atas, sikap di atas tampak dalam hubungan antara Indonesia dan RRT sepanjang tahun 2025. Indonesia terlihat berupaya memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh RRT, namun tidak diiringi dengan penerimaan tanpa syarat terhadap kepentingan strategis negara itu. Bahkan, berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2025 memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menegaskan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional, terutama dalam isu-isu yang bersinggungan dengan keamanan dan wilayah. Kesimpulan ini, dalam pandangan Mutia, memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia dan RRT di tahun 2025 dapat dipahami sebagai sebuah kesinambungan strategis.

Berbagai data dan pembahasan yang disuguhkan dalam rangkaian tulisan dalam laporan mengenai RRT, Asia Tenggara, dan Indonesia sepanjang 2025 memperlihatkan bahwa perkembangan terkait RRT, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang berhubungan dengan kebijakan dan sepak terjang negara itu di kawasan, membawa dampak pada kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Khusus bagi Indonesia, berbagai perkembangan terkait hubungan dengan RRT itu menghadirkan berbagai tantangan di tengah peluang yang ada. Oleh karena itu, saat melakukan upaya memaksimalkan peluang, penting bagi Indonesia untuk

tetap mempertahankan kehati-hatian dan ketegasan, khususnya dalam menghadapi tantangan terkait kedaulatan dan kemandirian. Khusus dalam menghadapi situasi geopolitik yang berkembang dalam beberapa tahun belakangan, senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang diplomat Indonesia,<sup>7</sup> penting pula bagi Indonesia untuk mengedepankan postur bebas dan aktif, sebuah sikap yang telah kita pertahankan selama puluhan tahun dan masih tetap relevan hingga hari ini. Lagi pula, sebagai sebuah negara kepulauan, penting bagi Indonesia untuk berpegang pada hukum laut internasional, dalam hal ini Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai hukum laut (UNCLOS).

---

<sup>7</sup> Victor S. Hardjono, “Indonesia dan China Yang Berubah,” makalah dalam seminar publik “Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia,” Jakarta 29 Desember 2025.

# **Perkembangan Situasi Domestik Tiongkok 2025 dan Dampaknya bagi Indonesia**

Ignatius Edhi Kharitas dan Muhammad Farid

## **Ringkasan Utama**

- Untuk merespons gejolak dan ketidakpastian global, para pemimpin Tiongkok sepanjang tahun 2025 mulai mengubah narasi yang disampaikan kepada publik dengan menyoroti tantangan dan risiko yang sedang dihadapi oleh negara itu.
- Salah satu upaya untuk menghadapi tantangan itu adalah “kekuatan produksi berkualitas baru” untuk menciptakan peluang ekonomi di sektor teknologi terkini. Namun, hal itu memunculkan dilema karena sektor tersebut kurang bersifat padat karya, sementara Tiongkok masih menghadapi masalah pengangguran kaum muda.
- Upaya lain adalah peningkatan konsumsi domestik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi positif. Namun, upaya itu masih harus berhadapan dengan krisis properti yang berkepanjangan.
- Situasi ekonomi domestik Tiongkok yang cenderung stagnan membuat para produsen di negara itu bersaing dengan berlomba-lomba menurunkan harga. Tren involusi tersebut juga merambah pasar negara tetangga Tiongkok, termasuk Indonesia.

- Indonesia perlu memberi perhatian serius pada dampak yang diakibatkan dari tren di atas. Selain masuknya produk-produk Tiongkok dengan harga yang sangat bersaing, potensi masuknya industri dari Tiongkok ke Indonesia, meski dapat memberikan peluang, tak sedikit pula menghadirkan berbagai tantangan bagi Indonesia pada masa mendatang.

Tahun 2025 adalah tahun yang penuh gejolak dan ketidakpastian global. Semua negara terdampak oleh situasi tersebut, tak terkecuali Tiongkok. Sejak awal tahun tersebut, para pemimpin Tiongkok mulai mengubah narasi yang disampaikan kepada publik dengan menyoroti tantangan dan risiko yang sedang dihadapi oleh negara itu. Hal ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika mereka selalu memberikan jaminan kepada publik bahwa situasi negara itu terus membaik setelah pandemi Covid-19. Namun demikian, mereka juga mengemukakan sejumlah “resep” untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut yang dikemukakan dalam sejumlah agenda politik domestik sepanjang tahun 2025, seperti Sidang Dua Sesi dan Sidang Pleno Komite Sentra Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Meskipun sidang-sidang tersebut merupakan agenda internal PKT dan lebih banyak membahas masalah domestik Tiongkok, keputusan yang dihasilkan pada tataran tertentu dapat membawa dampak global,

mengingat Tiongkok saat ini adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Oleh karena itu, artikel ini akan menelaah hasil agenda politik domestik Tiongkok yang berlangsung pada tahun 2025 yang lalu, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, serta dampaknya baik di dalam negeri Tiongkok maupun pada tataran global. Secara khusus, artikel ini akan menyinggung dampak kondisi ekonomi dan politik Tiongkok tersebut pada Asia Tenggara dan Indonesia.

### **Sidang Pleno Komite Sentral PKT dan Ekonomi Berbasis Teknologi**

Pada tanggal 20–23 Oktober 2025, PKT menyelenggarakan Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral ke-20 di Beijing. Sidang yang merupakan salah satu agenda penting dalam politik domestik Tiongkok ini dihadiri oleh 168 anggota penuh dan 147 anggota pengganti. Komite Sentral PKT umumnya mengadakan tujuh sidang pleno selama masa jabatan lima tahunnya, dengan minimal bersidang sekali setiap tahunnya. Sidang ini bersifat rahasia dan diselenggarakan secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh anggota Komite Sentral. Dalam sidang pleno, rencana kebijakan yang sudah lebih dulu dibahas oleh Politbiro, yaitu kelompok elit yang beranggotakan 24 orang, didiskusikan secara lebih luas dengan seluruh anggota Komite Sentral. Setiap sidang pleno memiliki topik pembahasan tertentu, di mana sidang pleno ke-4 utamanya membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Di samping masalah ekonomi, sidang pleno kali ini juga menetapkan pemecatan sejumlah anggota Komite Sentral PKT yang menduduki jabatan kunci di kabinet dan militer Tiongkok. Hal itu diputuskan berdasarkan laporan Komisi Sentral untuk Inspeksi Kedisiplinan yang menemukan pelanggaran berat disiplin Partai dan hukum negara yang melibatkan para anggota tersebut. Sesuai dengan Konstitusi Partai, kursi-kursi kosong di Komite Sentral akibat pemecatan para anggota tersebut akan diisi oleh anggota pengganti.

Salah satu keputusan penting dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan dalam sidang pleno terakhir itu adalah menyetujui rekomendasi Rencana Lima Tahun ke-15 yang akan mulai berlaku pada 2026, sebagai sebuah peta jalan untuk mengarahkan pembangunan nasional Tiongkok hingga tahun 2030. Untuk diketahui, Rencana Lima Tahun (五年计划 *Wūnián Jìhuà*) adalah serangkaian inisiatif pembangunan sosial dan ekonomi yang ditetapkan oleh PKT sejak tahun 1953.

Xi Jinping, sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT dalam sidang pleno tersebut, membingkai lima tahun ke depan sebagai "jendela kesempatan" untuk mengamankan inisiatif strategis di tengah meningkatnya persaingan global dan untuk membuat kemajuan yang

menentukan menuju tujuan modernisasi sosialis.<sup>1</sup> Lebih lanjut, Xi menggambarkan periode Rencana Lima Tahun ke-15 yang akan datang sebagai tahap kritis untuk memperkuat fondasi dan mendorong kemajuan di semua lini menuju tujuan modernisasi 2035.<sup>2</sup>

Pernyataan Xi tersebut mencerminkan pandangan Tiongkok saat ini terhadap dampak situasi ketidakpastian global bagi kondisi domestik negara itu. Senada dengan pernyataan tersebut, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang mengatakan bahwa lingkungan eksternal yang semakin kompleks dan berat dapat memberikan dampak yang lebih besar pada perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan bahwa fondasi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di dalam negeri belum cukup kuat. Hal itu dinyatakan Li ketika menyampaikan Laporan Kerja Pemerintah dalam Sidang Dua Sesi, yakni Sidang Kongres Nasional dan Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok yang berlangsung bersamaan pada 5–11 Maret 2025.<sup>3</sup> Li

---

<sup>1</sup> Xinhua, “Zhuānzhù shíjiān chuāngkǒu, yíngdé zhànlüè zhǔdòng 抓住时间窗口 赢得战略主动” 25 Oktober 2025, tersedia daring <http://www.news.cn/politics/20251025/8387dbbc73a844a99ebf212c041d7e5e/c.html> (diakses 10 Desember 2025)

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhōngyāng Rénmín Zhèngfǔ 中华人民共和国中央人民政府, “Zhèngfǔ gōngzuò bàogào” 政府工作报告, 12 Maret 2025, tersedia daring [https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content\\_7013163.htm](https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm) (diakses 10 Desember 2025)

menambahkan bahwa diperlukan lebih banyak upaya untuk mengatasi masalah sosial dan memperbaiki kelemahan yang menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu kata kunci yang sering kali diulang, baik dalam Sidang Dua Sesi maupun Sidang Pleno ke-4, dan ditawarkan sebagai solusi adalah “kekuatan produksi berkualitas baru” (*xīn zhì shēngchǎn lì* 新质生产力). Singkatnya, Tiongkok berusaha menciptakan peluang ekonomi baru melalui sektor-sektor teknologi terkini, seperti telekomunikasi, kecerdasan buatan, energi terbarukan, kendaraan listrik, dan sebagainya. Terobosan itu mulai membuahkan hasil yang semakin nyata di tahun 2025.

Pada akhir Januari 2025, dunia teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) global digemparkan oleh peluncuran DeepSeek R-1 besutan perusahaan rintisan (*start-up*) teknologi asal Tiongkok. DeepSeek merupakan *chatbot* AI model bahasa besar (*large language model/LLM*) yang memiliki kemampuan berpikir, menalar, dan menjawab berbagai pertanyaan atau menanggapi perintah yang diajukan pengguna. Yang menjadi perhatian para pengamat teknologi adalah meskipun dikembangkan dengan biaya relatif lebih murah dan unit pemrosesan grafis (*graphics processing*

---

<sup>4</sup> Ibid.

*unit/GPU*) yang jauh lebih sedikit, kinerja DeepSeek dalam menjawab pertanyaan pengguna dapat menyamai atau bahkan mengungguli sejumlah *chatbot* AI lain yang sudah lebih dulu eksis. Padahal, Tiongkok pada saat itu masih menghadapi embargo ekspor produk, seperti teknologi AI terkini dan chip komputer bertenaga tinggi, dari Amerika Serikat. Perkembangan terakhir ini setidaknya dapat membuktikan bahwa Tiongkok dapat menciptakan teknologi tinggi dengan sumber daya dan talenta lokalnya, serta semakin menunjukkan keunggulan komparatif Tiongkok dalam menghasilkan produk berkualitas hampir sama dengan harga lebih murah daripada negara kompetitornya.

Tak lama setelah peluncuran DeepSeek, tepatnya pada 17 Februari 2025, Presiden Xi Jinping menghadiri simposium tingkat tinggi di bidang ekonomi swasta di Beijing. Dalam pertemuan itu, Xi bertemu dan berdialog dengan para eksekutif perusahaan teknologi, seperti telekomunikasi, semikonduktor, robotik, AI, dan kendaraan listrik. Kepada para eksekutif tersebut, Xi menekankan bahwa tantangan ekonomi negara itu hanya bersifat sementara dan juga menjanjikan penghapusan hambatan terhadap persaingan pasar yang adil.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Xinhua, “Xijìnpíng: Mínyíng jīngjì fāzhǎn qiánjǐng guǎngkuò dàiyōukèwéi mínyíng qīyè hé mínyíng qīyè jiǎ dàxiǎnshēnshǒu zhèngdàng qí shí 习近平：民营经济发展前景广阔大有可为 民营企业 and 民营企业家大显身手正当其时” 17 Februari 2025, tersedia daring

Pernyataan itu dapat dimaknai bahwa pemerintah Tiongkok mungkin sedang mengarahkan negaranya ke arah yang lebih ramah bisnis setelah bertahun-tahun melakukan pengetatan regulasi. Sebulan berikutnya, narasi serupa juga diserukan oleh PM Li Qiang dalam Sidang Dua Sesi.

### **Isu Ekonomi dan Politik Aktual**

Transformasi dari “pabrik manufaktur dunia” menjadi “pusat industri teknologi” merupakan terobosan Tiongkok untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable. Akan tetapi, perubahan ini harus diikuti oleh kemampuan menciptakan lapangan kerja, mengingat industri teknologi lebih bersifat padat modal daripada padat karya; apalagi, pemerintah Tiongkok sudah memperkirakan bahwa jumlah *fresh graduate* dari perguruan tinggi pada tahun 2026 mencapai 12,7 juta orang. Tingginya jumlah pencari kerja menyebabkan sebagian di antara mereka mengambil pekerjaan di sektor informal, misalnya menjadi kurir dan pengemudi angkutan daring, karena tidak tersedia lowongan pekerjaan di sektor formal yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Dalam melaksanakan transformasi fokus industri, pemerintah Tiongkok harus mempertimbangkan masalah sosial tersebut.

---

<http://www.news.cn/politics/leaders/20250217/8bccf23cac99480bbb1f4b23cb209824/c.html> (diakses 10 Desember 2025).

Isu ekonomi memang tidak bisa begitu saja terlepas dari isu politik, terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang terjadi hingga memasuki tahun 2026 di Tiongkok. Pada 25 Desember 2025, Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) mengadakan pertemuan yang membahas rencana Partai dalam memperbaiki perilaku, membangun integritas, dan memerangi korupsi pada tahun 2026. Seperti disampaikan oleh *Xinhua*, pertemuan itu menyatakan bahwa pada 2026, badan inspeksi disiplin dan pengawasan harus mendorong pengelolaan diri Partai yang menyeluruh dan ketat dengan standar yang lebih tinggi serta tindakan yang lebih efektif. Hal itu untuk memberi jaminan kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial selama periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030).<sup>6</sup>

Dalam perspektif berbeda, sebagian pengamat Tiongkok berpandangan bahwa isu pemberantasan korupsi dapat dilihat sebagai isu yang *multilayered*. Dalam hal ini, terdapat asumsi bahwa selain untuk penegakan hukum, isu korupsi dapat digunakan untuk mengonsolidasikan

---

<sup>6</sup> Xinhua, “Xi chairs CPC leadership meeting on Party conduct, anti-corruption work,” 25 Desember 2025, tersedia daring <https://english.news.cn/20251225/b1b579019cf041baa92e629a6f5bac45/c.html> (diakses 5 Januari 2026).

kekuasaan dengan menggeser para pejabat yang memiliki pandangan berbeda.<sup>7</sup>

Tantangan lain yang dihadapi Tiongkok pada tahun 2026 adalah upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi; salah satunya dengan mendorong peningkatan konsumsi domestik yang terus diserukan, baik dalam Sidang Dua Sesi maupun Sidang Pleno ke-4 terakhir. Tiongkok saat ini memang sedang berjuang menghadapi tekanan deflasi. Sejumlah faktor turut berkontribusi pada situasi kurang menguntungkan yang ditandai dengan tren penurunan harga barang-barang. Dari aspek internal, krisis properti yang berkepanjangan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sektor properti tidak hanya menyumbang porsi yang cukup besar bagi produk domestik bruto Tiongkok, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk menyimpan kekayaan bagi mayoritas penduduk Tiongkok. Berdasarkan data bulan Agustus 2025, harga rumah baru turun 0,3% secara bulanan dan turun 2,5% secara tahunan. Tren penurunan itu berimbas pada merosotnya kekayaan rumah tangga yang umumnya diinvestasikan dalam bentuk aset properti. Hal itu

---

<sup>7</sup> Bloomberg News, “China military purge targets group who undermined Xi’s authority,” 23 Oktober 2025, tersedia daring <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-23/china-military-purge-targets-group-who-undermined-xi-s-authority> (diakses 10 Desember 2025).

membuat masyarakat Tiongkok cenderung mengerem konsumsi.

Pemerintah Tiongkok sepanjang tahun 2025 telah berusaha memberikan berbagai insentif untuk menggenjot konsumsi rumah tangga. Misalnya, subsidi untuk menukar kendaraan, peralatan rumah tangga, dan peralatan industri lama dengan model yang lebih baru dan lebih efisien. Subsidi juga diberikan dalam bentuk tunjangan anak, penitipan anak, dan perawatan lansia. Akan tetapi, usaha tersebut sepertinya masih belum menampakkan hasil maksimal. Salah satu indikator yang dapat menjadi acuan adalah situasi libur panjang Hari Nasional dan Festival Pertengahan Musim Gugur yang jatuh berurutan di awal Oktober 2025. Selama libur nasional delapan hari tersebut, jumlah perjalanan wisata memang meningkat, tetapi pengeluaran wisatawan masih belum bisa menyamai kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Dari sisi eksternal, Tiongkok juga harus menghadapi tarif tinggi Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barangnya yang diekspor ke negara tersebut. Perubahan kebijakan AS yang tiba-tiba itu membuat *inventori* produsen Tiongkok menumpuk di gudang dan perlu dicarikan cara lain untuk menjual barang-barang tersebut di luar AS, pasar tujuan ekspor terbesar Tiongkok. Hal ini memunculkan istilah yang sering muncul tahun ini, yaitu involusi (内卷 *nèi juǎn*). Secara singkat, involusi

mengacu pada penurunan harga yang sengaja dilakukan produsen demi meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Keputusan bisnis itu menciptakan perang harga di antara produsen, bahkan dengan mengorbankan laba perusahaan. Sekalipun para produsen sengaja menurunkan harga, perilaku konsumen yang masih mengurangi pembelanjaan dengan alasan yang sudah dijelaskan di atas membuat isu deflasi masih terus membayangi perekonomian Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok sudah menyadari masalah ini. Bahkan, dalam rapat Politbiro bulan Juli 2025, Presiden Xi Jinping menggenjarkan kampanye anti involusi.<sup>8</sup> Masalah “persaingan yang tidak terkendali” itu sudah didiskusikan dan dicarikan solusinya. Salah satu hasilnya adalah perubahan Undang-Undang Penetapan Harga untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade yang melarang penjualan di bawah harga pokok guna menyingkirkan pesaing. Langkah ini diambil untuk menghentikan perang harga dan praktik bisnis yang tidak standar.

---

<sup>8</sup> Ju Li, “Shēnkè rènshí hé zònghé zhěngzhì ‘nèi juǎn shì’ jìngzhēng 深刻认识和综合整治“内卷式”竞争,” Qiushi Wang, 1 Juli 2025, tersedia daring <https://www.qstheory.cn/20250629/6d682af56d64487f817084e890fbcd/fd/c.html> (diakses 10 Desember 2025).

## **Dampak Bagi Kawasan Asia Tenggara**

Walaupun berakar dari masalah domestik, persoalan involusi yang mengakibatkan perang harga di kalangan produsen Tiongkok ini patut menjadi perhatian negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ketika perang tarif dengan AS mulai memanasi awal tahun ini, Tiongkok mulai memikirkan cara untuk menjual barang-barang produksinya ke pasar lain yang lebih bersahabat dalam hal tarif. Asia Tenggara adalah pilihan utama karena selain posisi geografis yang lebih dekat, kawasan ini menyimpan potensi pasar yang besar dari segi populasi penduduk maupun pertumbuhan kelas menengah. Hal yang terpenting, Tiongkok dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sudah memiliki perjanjian kawasan perdagangan bebas yang memungkinkan keduanya melakukan ekspor-impor dengan tarif seminimal mungkin. Pergeseran pasar itu dapat dilihat dari data volume ekspor Tiongkok ke Asia Tenggara yang melonjak drastis sejak perang tarif dengan AS dimulai.<sup>9</sup> Sama halnya ketika pemerintah Tiongkok mulai mengencangkan kampanye anti-involusi, para produsen Tiongkok justru mulai membawa imbas perang harga ke kawasan Asia Tenggara.

---

<sup>9</sup> Owen Walker, "US tariffs prompt surge in Chinese exports to south-east Asia," *Financial Times*, 7 Desember 2025, tersedia daring <https://www.ft.com/content/16d0336b-d855-42ae-b0a7-d509d21cec9b?syn-25a6b1a6=1> (diakses 10 Desember 2025).

Contoh paling baru adalah industri mobil listrik. Fenomena perang harga di kalangan pabrikan Tiongkok, yang semula hanya terjadi di pasar domestik, kini mulai merambah pasar luar Tiongkok, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari harga jual model-model terbaru yang jauh lebih rendah dari perkiraan awal. Di satu sisi, diskon besar-besaran yang diberikan produsen mobil Tiongkok ini memberikan keuntungan bagi konsumen Indonesia, yaitu berupa banyaknya pilihan dan kemudahan mendapatkan mobil ramah lingkungan berteknologi tinggi. Namun di sisi lain, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperingatkan bahwa tren itu justru berdampak negatif bagi industri otomotif tanah air. Selama ini, mobil listrik asal Tiongkok masuk ke pasar Indonesia melalui impor mobil utuh (*completely built-up/CBU*), terlebih lagi ditambah dengan sejumlah insentif pembebasan pajak dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Gaikindo mendukung kebijakan terbaru pemerintah Indonesia yang mewajibkan produsen mobil listrik Tiongkok untuk membangun pabrik di Indonesia.

Kecenderungan produsen Tiongkok yang berlomba-lomba mencari pasar alternatif di luar negeri karena situasi domestik yang cenderung stagnan akibat situasi dalam negeri dan tekanan eksternal sebenarnya memberi peluang bagi Indonesia. Sebagai contoh, bila produsen mobil listrik Tiongkok membangun pabriknya di Indonesia, peluang bagi tenaga kerja Indonesia akan

meningkat. Di sisi lain, Indonesia masih gencar menjalankan program hilirisasi nikel, yang menjadi salah satu komponen utama baterai mobil listrik. Dengan adanya pabrik mobil listrik di Indonesia, diharapkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengolahan nikel semakin banyak dinikmati di Indonesia. Hal itu dapat dimungkinkan karena seluruh rantai pasok, mulai dari tambang, pabrik pengolahan (smelter), pabrik prekursor/katoda, hingga pabrik perakitan mobil dan baterai, akan berada di Indonesia.

Akan tetapi, hal itu menimbulkan permasalahan lain di Indonesia; di antaranya, kecenderungan perusahaan asal Tiongkok membawa tenaga kerja asal negara itu hingga pada level tak terlatih, sehingga berpotensi menimbulkan isu kecemburuan sosial. Selain itu, hadirnya industri asing – termasuk Tiongkok – masih kurang disertai dengan transfer teknologi sehingga belum secara maksimal membawa kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kapasitas industri Indonesia. Padahal peningkatan kapasitas industri merupakan sebuah isu yang tidak kalah penting, kalau bukan lebih penting, dibandingkan penciptaan tenaga kerja. Oleh karenanya, isu ini perlu pula menjadi bahan pertimbangan.

## **Kesimpulan**

Di tahun 2026, Tiongkok akan fokus pada dua agenda utama, yaitu konsolidasi kekuasaan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Tiongkok melihat bahwa stabilitas politik merupakan fondasi penting untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, Tiongkok tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kestabilan politik sehingga mampu menghadapi tantangan domestik maupun tekanan global secara lebih terarah.

Di sisi lain, pembahasan di atas menunjukkan bahwa dinamika domestik di Tiongkok secara tidak langsung berimbas ke negara lain, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, dinamika politik domestik di Tiongkok belum menunjukkan arah terjadinya perubahan signifikan dalam kebijakan politik luar negeri negara itu terhadap Indonesia. Akan tetapi, dinamika kondisi perekonomian Tiongkok sudah berdampak cukup signifikan terhadap kompetisi pasar di Indonesia. Fenomena tersebut menegaskan bahwa pembuat kebijakan Indonesia harus responsif dan antisipatif terhadap dinamika yang terjadi di negara sebesar Tiongkok.

# **Diplomasi Politik Dan Upaya Tiongkok Memperkuat Pengaruh di Asia Tenggara: Refleksi Tahun 2025**

Ratih W. Kabinawa dan Johannes Herlijanto

## **Ringkasan Utama**

- Sejak dimulainya kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2013, Tiongkok berupaya meningkatkan pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Upaya ini mencapai momentum pada tahun 2025, ketika meningkatnya ketegangan politik global menciptakan peluang bagi Tiongkok untuk semakin mengukuhkan kepemimpinannya di Asia Tenggara sekaligus mengonsolidasikan kepentingan strategisnya.
- ASEAN diposisikan sebagai poros strategis utama diplomasi Tiongkok, bukan sekadar mitra ekonomi, melalui peningkatan keterlibatan diplomatik, dukungan terhadap perluasan keanggotaan (Timor-Leste), serta inisiatif forum transregional seperti KTT GCC–ASEAN–Tiongkok.
- Inovasi diplomasi Tiongkok terlihat melalui mekanisme dialog bilateral “2+2”, dimulai dengan Indonesia, yang memperluas pengaruh Beijing di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, namun juga membawa risiko ketergantungan strategis, polaritas regional, dan resistensi domestik di negara mitra.

- Isu Laut Cina Selatan dan dinamika Filipina–Tiongkok menjadi hambatan struktural utama, terutama selama keketuaan Filipina di ASEAN 2026, yang berpotensi membatasi efektivitas diplomasi Tiongkok dan memperkuat keterlibatan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan sekutunya.
- Retorika normatif “komunitas masa depan bersama” menjadi instrumen ideologis Tiongkok, diadopsi oleh beberapa negara Asia Tenggara, tetapi memunculkan kontradiksi antara narasi dan praktik di lapangan, serta berisiko menimbulkan fragmentasi internal ASEAN dan merupakan kritik terhadap tatanan liberal internasional (LIO).

Eskalasi ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik dan Timur Tengah membuka peluang strategis bagi Tiongkok untuk memperkuat kepemimpinannya di Asia Timur dan Tenggara. Momentum ini sejalan dengan visi Tiongkok untuk memposisikan diri sebagai salah satu pemimpin global, terutama sejak berada di bawah pemerintahan Xi Jinping. Dalam kerangka tersebut, Beijing mengedepankan narasi bahwa prioritas diplomasi dan kebijakan luar negeri Tiongkok sepanjang 2025 diarahkan pada upaya membentuk kepastian dan stabilitas global,<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, “Wang-Yi: China will provide certainty in this uncertain world, Ministry of Foreign Affairs, People’s Republic of China,” 7 Maret 2025, tersedia daring [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjzbzd/202503/t20250307\\_115](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjzbzd/202503/t20250307_115)

sebuah klaim yang, bila direspons positif oleh negara-negara di kawasan, akan menguntungkan posisi serta kepemimpinan Tiongkok. Baik pada level internasional maupun regional, terutama di Asia Tenggara, Beijing berupaya mempertahankan pengaruh politiknya melalui strategi diplomasi yang lebih terukur dan terintegrasi dengan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan.

Dalam konteks tersebut, negara-negara Asia Tenggara tidak lagi diposisikan semata sebagai mitra ekonomi, tetapi sebagai poros strategis yang menentukan keberlanjutan pengaruh Tiongkok di Asia dan Pasifik. Beijing berupaya mengintensifkan kehadiran diplomatik, memperluas dialog politik, dan membangun basis ideologis yang mendukung visinya mengenai “komunitas dengan masa depan bersama”. Upaya ini dibingkai dalam narasi multilateralisme yang pada praktiknya bertujuan memperkuat legitimasi Tiongkok dalam arsitektur politik di Asia Tenggara dan mengimbangi kekuatan eksternal lainnya, khususnya Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Artikel ini berupaya memberikan telaah kritis atas dinamika dan pola diplomasi Tiongkok di Asia Tenggara sepanjang 2025, termasuk bagaimana strategi tersebut membentuk konfigurasi kekuatan di kawasan serta implikasi jangka panjangnya. Analisis ini juga menilai

---

[70117.html#:~:text=We%20will%20continue%20to%20expand,beneficial%20and%20inclusive%20economic%20globalization](#) (diakses 22 Desember 2025).

sejauh mana kebijakan luar negeri Tiongkok pada tahun 2025 akan menjadi landasan penting bagi Beijing dalam menghadapi tantangan struktural dan peluang strategis yang diperkirakan mengemuka pada 2026.

### **ASEAN: Poros Politik dan Diplomasi Tiongkok di Asia Tenggara**

Sepanjang tahun 2025, Beijing semakin memperkuat peran serta pengaruhnya dalam hubungan dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Indikasi dari fenomena ini terlihat, antara lain, melalui keterlibatan aktif dan peran sentral Tiongkok dalam sejumlah inisiatif baru yang melibatkan ASEAN. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) trilateral *Gulf Cooperation Council* (GCC)—ASEAN—Tiongkok di Kuala Lumpur pada 27 Mei 2025. KTT tersebut menandai bentuk interaksi baru antara ASEAN dan blok negara-negara Timur Tengah dengan Tiongkok sebagai aktor kunci. Inisiatif trilateral ini mencerminkan upaya Beijing untuk mendorong forum transregional, dengan memasukkan ASEAN ke dalam arsitektur diplomasi lintas kawasan yang lebih luas. Namun demikian, kapasitas dan efektivitas forum ini masih belum dapat dipastikan karena mekanisme trilateral tersebut belum menunjukkan arah institusionalisasi yang jelas. Akibatnya, masih menjadi pertanyaan apakah platform ini akan berkembang menjadi instrumen strategis yang mampu memengaruhi dinamika kekuatan

kedua kawasan, atau sekadar berhenti pada tingkat forum konsultatif dengan dampak geopolitik yang terbatas.

Selain itu, isu perluasan keanggotaan ASEAN menjadi salah satu dimensi penting dalam diplomasi luar negeri Tiongkok sepanjang 2025. Penerimaan resmi Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN berlangsung dengan dukungan politik yang kuat dari Tiongkok, yang memandang proses akses tersebut sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruhnya dalam arsitektur institusional kawasan serta dalam dinamika pengambilan keputusan di Asia Tenggara.<sup>2</sup> Sejalan dengan temuan berbagai peneliti, Tiongkok kerap memanfaatkan hubungan bilateral yang erat dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memengaruhi posisi ASEAN, terutama ketika negara-negara tersebut menjabat sebagai Ketua ASEAN.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, masuknya Timor-Leste sebagai anggota baru membuka ruang bagi Tiongkok untuk memanfaatkan hubungan historis dan ekonomi yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan negara tersebut. Tiongkok merupakan negara pertama yang

---

<sup>2</sup> Derek Grossman, "Timor-Leste Adds a New Wrinkle to U.S.-China Competition," *Foreign Policy*, 16 October 2025, tersedia daring <https://foreignpolicy.com/2025/10/16/timor-leste-asean-us-china-competition-south-china-sea/> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>3</sup> Ratih Kabinawa, How China Woos ASEAN's Chairman to Exert Its Influence in the Region, *Forum Sinologi Indonesia*, 8 Oktober 2025, <https://www.forumsinologi.id/opinion/how-china-woos-aseans-chairman-to-exert-its-influence-in-the-region> (diakses 22 Desember 2025).

mengakui kedaulatan Timor-Leste pada awal 2000-an dan menjadi salah satu investor terbesar yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur Dili dan wilayah lainnya.<sup>4</sup> Modal historis dan ekonomi ini berpotensi memperkuat kapasitas Tiongkok untuk mempengaruhi sikap ASEAN ketika kelak Timor-Leste memegang keketuaan—sebuah momen yang dapat memperluas pengaruh Tiongkok terhadap agenda regional, termasuk isu maritim, inisiatif konektivitas, maupun norma-norma terkait tatanan Indo-Pasifik.

Terlepas dari langkah-langkah diplomasi politik yang telah ditempuh, tantangan terbesar tetap berkaitan dengan isu maritim dan klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan sejumlah negara Asia Tenggara. Diplomasi Tiongkok di ASEAN pada 2026 diproyeksikan menghadapi hambatan signifikan, mengingat posisi Ketua ASEAN akan dipegang oleh Filipina. Sepanjang 2025, ketegangan politik dan insiden maritim di Laut Cina Selatan meningkat tajam antara Manila dan Beijing, termasuk beberapa persinggungan langsung antara penjaga pantai kedua negara. Keputusan Filipina untuk memperdalam keterlibatannya dalam tatanan minilateral pertahanan, yang melibatkan Amerika

---

<sup>4</sup> Lye Liang Fook, “Timor-Leste and China: Navigating the fine line of power and progress,” Think China, 27 Agustus 2025, tersedia daring <https://www.thinkchina.sg/politics/timor-leste-and-china-navigating-fine-line-power-and-progress> (diakses 22 Desember 2025).

Serikat, Jepang, India, dan Australia, semakin memperjelas orientasi strategis Manila yang cenderung menyeimbangkan atau bahkan mengontraskan kepentingannya terhadap Tiongkok. Hal ini khususnya terlihat dalam isu sengketa Laut Cina Selatan serta dalam dinamika yang berkaitan dengan Taiwan. Manila tampaknya tidak segan menjadikan isu Taiwan sebagai instrumen tawar-menawar baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat beserta sekutunya dalam merespons tekanan Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Layaknya Filipina, masing-masing negara anggota ASEAN lainnya juga memiliki preferensi dan kepentingan strategis yang berbeda dalam berinteraksi dengan Tiongkok sehingga memengaruhi diplomasi Tiongkok di institusi regional tersebut. Kamboja, Laos, dan Myanmar, misalnya, kerap dipersepsikan sebagai sekutu dekat Tiongkok, sehingga cenderung mengakomodasi kepentingan Beijing. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki sengketa di Laut Cina Selatan umumnya bersikap lebih berhati-hati dan menerapkan strategi *hedging*, seperti yang ditunjukkan oleh Vietnam. Sementara itu, negara-negara dengan posisi relatif netral, seperti Indonesia dan Singapura, cenderung mengadopsi pendekatan pragmatis, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya kedekatan yang cukup signifikan antara Indonesia dengan Tiongkok. Perbedaan preferensi ini menunjukkan bahwa respons

terhadap diplomasi Tiongkok di ASEAN bersifat sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika, termasuk politik domestik masing-masing negara Asia Tenggara.

### **Diplomasi “2+2”: Sebuah Format Dialog Baru Tiongkok di Asia Tenggara?**

Selain memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara, Tiongkok memperkenalkan format dialog bilateral baru, yaitu mekanisme “2+2” yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari dua negara. Format ini dirancang untuk memungkinkan koordinasi langsung mengenai isu politik, pertahanan, keamanan, dan kerja sama maritim. Sebagai langkah awal dari inisiatif barunya di Asia Tenggara, Tiongkok menggandeng Indonesia sebagai mitra pertama dalam penyelenggaraan dialog “2+2” tingkat menteri pertama yang pernah diselenggarakan Tiongkok.<sup>5</sup> Pertemuan tersebut berlangsung di Beijing pada April 2025 dan menandai pendalaman kemitraan strategis kedua negara. Selain Indonesia, Tiongkok juga telah menyampaikan minat untuk mendorong mekanisme serupa dengan negara

---

<sup>5</sup> Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, “China and Indonesia hold the 1<sup>st</sup> Ministerial Meeting of China Joint Foreign and Defense Ministerial Dialogue,” 21 April 2025, tersedia daring [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjb/wjbz/hd/202504/t20250422\\_11601354.html](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb/wjbz/hd/202504/t20250422_11601354.html) (diakses 22 Desember 2025).

lain di kawasan, termasuk Malaysia dan Kamboja,<sup>6</sup> sebagai bagian dari perluasan diplomasi bilateralnya di Asia Tenggara.

Menggandeng Indonesia sebagai mitra pertama dalam penyelenggaraan dialog gabungan kementerian luar negeri dan pertahanan memberikan implikasi strategis tersendiri bagi Tiongkok. Pertama, dialog dengan Indonesia berpotensi menciptakan efek domino di Asia Tenggara, mengingat posisi strategis Indonesia dan peran sentralnya dalam tatanan regional. Lagi pula, karena Indonesia merupakan negara yang besar dan berpengaruh di Asia Tenggara, dialog yang berpotensi memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia dapat meningkatkan stabilitas kawasan yang kondusif bagi pembangunan di Tiongkok.<sup>7</sup> Kedua, bentuk dialog gabungan kementerian luar negeri dan pertahanan, meskipun tidak selalu disebut “2+2”, telah lama digunakan oleh negara-negara besar dan aliansi mereka untuk memfasilitasi koordinasi politik dan keamanan,

---

<sup>6</sup> Lye Liang Fook, “China’s 2+2 diplomacy in Southeast Asia: Building bridges or papering cracks,” Think China, 13 Mei 2025, tersedia daring <https://www.thinkchina.sg/politics/chinas-22-diplomacy-southeast-asia-building-bridges-or-papering-cracks> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>7</sup> Ian Seow Cheng Wei dan Leonard C. Sebastian, “The Garuda Meets the Vigorous Dragon: The Significance of the Indonesia-China J-10 Deal,” S. Rajaratnam School of International Studies, 17 Desember 2025, <https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2025/12/IP25123.pdf> (diakses 22 Desember 2025).

termasuk dalam hubungan Amerika Serikat dengan beberapa mitra strategisnya.<sup>8</sup> Inisiatif Tiongkok dengan Indonesia dapat dipandang sebagai adaptasi dari praktik diplomasi yang telah mapan, sekaligus langkah untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan dan menyeimbangkan posisi Amerika Serikat. Ketiga, karena agenda dialog mencakup diplomasi maritim, ekonomi, dan keamanan, forum ini memberikan nilai strategis tambahan bagi Beijing dalam negosiasi bilateral dan kerja sama jangka panjang dengan Indonesia.

Bagi Indonesia, dialog “2+2” dengan Beijing membawa potensi implikasi strategis yang bersifat dualistik; terdapat sisi positif maupun risiko yang perlu dicermati. Dari sisi positif, pertama, forum ini dapat berfungsi sebagai *confidence-building measure* di tingkat menteri, sehingga memperkuat koordinasi diplomatik, keamanan, dan penegakan hukum antarnegara, meningkatkan saluran komunikasi dan transparansi antara Jakarta dan Beijing. Kedua, dialog ini membuka peluang pencegahan krisis dan konflik, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, dengan struktur resmi dan keterlibatan kementerian luar negeri dan pertahanan, kedua negara dapat merespons bersama terhadap potensi eskalasi militer atau insiden maritim terutama di Selat Taiwan atau Laut Cina Selatan. Ketiga, keberadaan dialog ini memperluas spektrum kemitraan strategis Indonesia,

---

<sup>8</sup> Fook, “China’s 2+2 diplomacy”.

tidak lagi bergantung secara eksklusif pada mitra tradisional Barat, dan membuka ruang diversifikasi kerja sama bilateral dalam bidang maritim, ekonomi, dan keamanan. Baik dialog “2+2” di atas maupun berbagai informasi yang beredar mengenai rencana pembelian alutsista dari Tiongkok, termasuk rencana pembelian pesawat tempur J-10, memperlihatkan hubungan kedua negara yang meningkat dalam aspek pertahanan. Bagi Tiongkok, hal ini dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan mengingat hingga beberapa waktu lalu, hubungan pertahanan antara Tiongkok dan Indonesia masih dianggap berada jauh di belakang hubungan ekonomi.<sup>9</sup>

Namun, hubungan pertahanan dengan Tiongkok, terutama melalui mekanisme dialog “2+2” maupun mekanisme-mekanisme lainnya, juga membawa sejumlah tantangan dan risiko bagi Indonesia. Pertama, terdapat potensi meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dalam isu-isu sensitif seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, yang dapat

---

<sup>9</sup> Evan A. Laksmana, “The underwhelming defence ties between Indonesia and China,” The International Institute for Strategic Studies, Mei 2024, tersedia daring <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/05/the-underwhelming-defence-ties-between-indonesia-and-china/> (diakses 22 Desember 2025); lihat juga Penghong Cai, “China–ASEAN Security Interactions and the South China Sea Issue,” dalam *China's Omnidirectional Peripheral Diplomacy*, diedit oleh Jianwei Wang dan Tiang Boon Hoo (World Scientific, 2019): hlm. 185-206.

menurunkan otonomi nasional dan kapasitas negosiasi Indonesia. Kedua, penguatan hubungan bilateral yang intens melalui “2+2” berpeluang memunculkan dinamika polaritas di tingkat regional, terutama dalam kerangka ASEAN—hal ini cukup berisiko bagi negara-negara anggota yang memiliki sengketa maritim dengan Tiongkok, seperti Filipina. Ketiga, dari perspektif domestik, dialog ini harus dikelola dengan sangat hati-hati dalam hal persepsi publik. Survei Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) 2024 menunjukkan bahwa 57% responden menyatakan kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, sedangkan 32% khawatir terhadap kebijakan Tiongkok terkait perairan Natuna.<sup>10</sup> Pada tataran elit, survei yang diselenggarakan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute di kalangan elit pemerintah, peneliti dan akademisi memperlihatkan bahwa 50% dari responden di Indonesia masih menganggap perilaku agresif di Laut Cina Selatan sebagai salah satu hal yang mengkhawatirkan.<sup>11</sup> Meski sekitar

---

<sup>10</sup> Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Yeta Purnama, Bhima Yudhistira Adhinegara, “China-Indonesia Survey 2024: Insights into Indonesian Public Perceptions of China,” Center of Economic and Law Studies, November 2024, tersedia daring [https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/11/CELIOS\\_CHINA\\_INDONESIA\\_SURVEY\\_2024\\_5b9e743ce3.pdf](https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/11/CELIOS_CHINA_INDONESIA_SURVEY_2024_5b9e743ce3.pdf) (diakses 22 Desember 2025).

<sup>11</sup> Sharon Seah et.al., “The State of Southeast Asia: 2025 Survey Report,” ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2 April 2024, tersedia daring <https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2025/03/The-State-of-SEA-2025-1.pdf> (diakses 22 Desember 2025).

72% responden yang berasal dari kalangan elit itu menyatakan lebih memihak Tiongkok dibanding dengan AS bila mereka dipaksa untuk memilih, sejumlah besar dari mereka (sekitar 57,5%) menganggap pelanggaran Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagai hal yang mengkhawatirkan mereka.<sup>12</sup> Bahkan 85,3% dari para responden sepakat agar ASEAN mengambil sikap yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS, dan menghormati hasil arbitrase internasional tahun 2016.<sup>13</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa komunikasi dan transparansi yang baik, dialog strategis dengan Tiongkok bisa menimbulkan resistensi internal dan memengaruhi legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia.

### **Retorika Politik-Normatif: “Komunitas Masa Depan Bersama”**

Sebagai bagian dari upaya membangun kepemimpinan global, Xi Jinping tidak hanya bertumpu pada kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan, tetapi juga memanfaatkan retorika politik sebagai instrumen *discourse of power* Tiongkok. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 2015, Tiongkok secara aktif mendorong komunitas internasional untuk

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

mengadopsi narasi politik “komunitas masa depan bersama” (*community of shared future for mankind*).<sup>14</sup> Frasa “komunitas masa depan bersama” mengandung makna bahwa Tiongkok ingin berperan lebih aktif dalam mengisi kesenjangan yang ditimbulkan oleh krisis multidimensi global yang dianggap sebagai konsekuensi dari hegemoni Barat.<sup>15</sup> Narasi ini sejalan dengan upaya Beijing untuk membangun tatanan internasional alternatif yang mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, harmoni, keberagaman, kerja sama, dan persatuan.<sup>16</sup>

Selain diperkenalkan secara luas melalui forum multilateral di PBB, Beijing juga berupaya menyebarkan retorika politik tersebut melalui diplomasi bilateral dengan negara-negara di kawasan, khususnya di Asia Tenggara. Misalnya, dalam pernyataan bersama antara Indonesia dan Tiongkok pada 9 November 2024, Indonesia menyepakati pencantuman frasa “komunitas masa depan bersama.”<sup>17</sup> Sejalan dengan Indonesia,

---

<sup>14</sup> Klaus Heinrich Raditio, “Deciphering Xi Jinping’s Community of Shared Future for Mankind, E-International Relations,” E-International Relations, 9 September 2024, tersedia dari <https://www.e-ir.info/2024/09/09/deciphering-xi-jinpings-community-of-shared-future-for-mankind/> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Joint Statement Between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future,” 9

Vietnam,<sup>18</sup> Malaysia,<sup>19</sup> dan Kamboja<sup>20</sup> juga mengadopsi retorika politik serupa dalam pernyataan bersama mereka dengan Tiongkok selama rangkaian lawatan Xi Jinping ke Asia Tenggara pada bulan April 2025. Adopsi frasa tersebut oleh negara-negara di Asia Tenggara menarik untuk dicermati, mengingat negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada secara tegas menolak penggunaan retorika politik

---

November 2024, tersedia daring <https://kemlu.go.id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and--the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>18</sup> VietnamPlus, “Vietnam, China issue joint statement,” 15 April 2025, tersedia daring <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-china-issue-joint-statement-post315453.vnp> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>19</sup> Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, “Joint Statement Between the People’s Republic of China and Malaysia on Building a High-level Strategic Malaysia-China Community with a Shared Future,” 17 April 2025, tersedia daring <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/joint-statement-between-the-people-s-republic-of-china-and-malaysia-on-building-a-high-level-strategic-malaysia-china-community-with-a-shared-future-1> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>20</sup> Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Kingdom of Cambodia, “Joint Statement between the Kingdom of Cambodia and the People’s Republic of China on Building an All-weather Cambodia-China Community with a Shared Future in the New Era and Implementing the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative, 18 April 2025, <https://www.mfaic.gov.kh/posts/2025-04-18-Press-Release-Joint-Statement-between-The-Kingdom-of-Cambodia-and-The-People-s-Republic-of-China-on-Building-an-All-19-59-27> (diakses 22 Desember 2025).

ini dalam Deklarasi Peringatan 75 Tahun Piagam PBB<sup>21</sup>. Penolakan tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa visi Tiongkok mengenai “komunitas masa depan bersama” merepresentasikan bentuk *counter-hegemony* terhadap tatanan liberal internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat.<sup>22</sup>

Selain berpotensi menciptakan polaritas antara negara-negara Barat dan negara-negara *Global South*, penggunaan frasa tersebut juga memiliki implikasi strategis yang perlu dicermati dengan hati-hati oleh negara-negara Asia Tenggara. Pada tingkat institusional kawasan, adopsi frasa ini dapat menimbulkan fragmentasi internal di Asia Tenggara, terutama bagi negara-negara yang enggan mengintegrasikan retorika politik tersebut dalam pernyataan bersama atau kerangka kerja diplomatik mereka. Di sisi lain, terdapat kontradiksi yang cukup tajam antara narasi normatif yang terkandung dalam frasa tersebut dengan praktik diplomasi Tiongkok di lapangan, yang kerap ditandai oleh penggunaan kekuatan militer, diplomasi asertif, dan penerapan standar ganda, khususnya dalam penyelesaian sengketa kedaulatan di

---

<sup>21</sup> Klaus Heinrich Raditio, “‘Nila Setitik’ dalam Pernyataan Bersama RI-China,” Kompas, 16 November 2024, tersedia daring <https://www.kompas.id/artikel/nila-setitik-dalam-pernyataan-bersama-ri-china> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>22</sup> Amitav Acharya, “After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order,” *Ethics and International Affairs*, 31, No. 3, 2017, pp. 271-285.

Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ketidaksihesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Tiongkok terhadap nilai-nilai yang diklaimnya, seperti kesetaraan, keadilan, harmoni, keberagaman, kerja sama, dan persatuan.

### **Kesimpulan**

Diplomasi Tiongkok sepanjang 2025 dan menuju 2026 menampilkan pola ganda: di satu sisi memperkuat kerja sama multilateral dan bilateral, serta menunjukkan komitmen terhadap integrasi kawasan; di sisi lain tetap berhadapan dengan dilema struktural yang bersumber dari klaim kedaulatan, ketegangan militer, serta persepsi ketergantungan strategis terhadap Beijing. Keberhasilan diplomasi Beijing pada akhirnya tidak hanya akan dinilai dari intensitas dialog atau pernyataan bersama, tetapi dari hasil konkret yang tercermin dalam stabilitas kawasan, tingkat kepercayaan negara-negara mitra, serta sejauh mana peran Tiongkok dapat diterima dalam jangka panjang sebagai aktor kunci di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, strategi Beijing sepanjang 2025 memperlihatkan upaya sistematis untuk memosisikan Asia Tenggara sebagai poros politik di Indo-Pasifik, bukan semata-mata mitra ekonomi. Asia Tenggara nampaknya diposisikan sebagai salah satu bagian terpenting dari “diplomasi periferi” Tiongkok yang

bersifat multiarah.<sup>23</sup> Namun, legitimasi dan keberlanjutan pengaruh tersebut bergantung pada kemampuan Tiongkok dalam menyeimbangkan kepentingan strategisnya dengan kedaulatan, sensitivitas domestik, dan aspirasi politik negara-negara anggota ASEAN.

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, diperlukan upaya sistematis untuk lebih berhati-hati dalam memahami kepentingan dan motif strategis Beijing dalam berbagai inisiatif dialog dan kerja sama, baik di tingkat bilateral maupun kawasan. Bagi Indonesia, yang memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, kewaspadaan ini penting untuk mencegah perubahan polaritas atau orientasi kebijakan luar negeri yang terlalu condong kepada Tiongkok. Negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja menghadapi dilema serupa; mereka perlu mengembangkan strategi diplomasi yang fleksibel, mampu menegosiasikan kepentingan nasional secara seimbang antara Beijing dan kekuatan besar lain, serta memperkuat kerja sama regional untuk mencegah dominasi unilateral. Selain itu, negara-negara ini sebaiknya meningkatkan kapasitas institusi dan mekanisme diplomasi ASEAN, agar kebijakan luar negeri mereka tidak hanya reaktif terhadap tekanan eksternal,

---

<sup>23</sup> Jianwei Wang dan Hoo Tiang Boon, "Periphery Diplomacy: Moving to the Center of China's Foreign Policy," dalam *China's Omnidirectional Peripheral Diplomacy*, (World Scientific, 2019): hlm. 3-14.

tetapi juga proaktif dalam membentuk agenda regional yang berorientasi pada kepentingan kolektif dan keamanan bersama. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai institusi regional memiliki peran penting untuk menyeimbangkan kekuatan besar dan memanfaatkan dinamika geopolitik guna menciptakan stabilitas kawasan yang menguntungkan negara-negara anggotanya, baik dari segi politik, keamanan, maupun ekonomi.



# **Tiongkok dan Keamanan Asia Tenggara di 2025**

Ristian Atriandi Supriyanto

## **Ringkasan Utama**

- Kebijakan keamanan Tiongkok di tahun 2025 tampak dari dua naskah strategis, yaitu Buku Putih Keamanan Nasional dan Prakarsa Tata Kelola Global. Kedua naskah ini menekankan persatuan nasional Tiongkok yang masih belum tercapai serta prinsip kedaulatan mutlak yang bertumpu pada kendali tunggal Partai Komunis Tiongkok.
- Keamanan Asia Tenggara menjadi bergejolak akibat tiga perkembangan utama: kisruh Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, Perang Kamboja-Tailan dan Konflik Myanmar, serta diplomasi pertahanan dan modernisasi militer Tiongkok.
- Peristiwa di atas mengalami eskalasi vertikal maupun horizontal. Eskalasi vertikal menyangkut penggunaan kekerasan bersenjata atau tak bersenjata dalam suatu sengketa antarnegara. Sedangkan eskalasi horizontal terjadi ketika makin banyak pihak atau wilayah yang terseret dalam pusaran sengketa tersebut.
- Peran dan pengaruh Tiongkok dalam semua peristiwa di atas membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Melalui diplomasi pertahanan dan modernisasi militernya, Beijing menawarkan peluang sebagai mitra strategis alternatif bagi Indonesia di luar pihak Barat.

- Keputusan Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini bukanlah cermin kelemahan. Diplomasi pertahanan dengan Tiongkok justru menjadi sarana dialog Indonesia untuk membicarakan kepentingan dan prioritas keamanan yang berbeda, bahkan berlawanan, tanpa menyulut ketegangan baru dalam hubungan bilateral.
- Namun, tantangannya adalah Beijing akan makin berani menolak kehadiran militer Amerika Serikat (AS) dan berusaha menyelesaikan sengketa batas wilayah secara sepihak, seperti dengan Filipina di Laut Cina Selatan. Keberanian Tiongkok ini berdampak buruk bagi Indonesia yang letaknya berdekatan dan berbatasan dengan wilayah di mana konflik AS-Tiongkok berkemungkinan meletus.

### **Kebijakan Keamanan Tiongkok**

Pada bulan Mei 2025, Beijing menerbitkan Buku Putih Keamanan Nasional yang pertama sejak 2019. Buku tersebut menerangkan kebijakan umum pertahanan dan keamanan Tiongkok, termasuk terhadap Asia Tenggara. Beijing menuduh “kekuatan-kekuatan Barat anti-Tiongkok berupaya keras untuk membendung, menekan, dan menindas Tiongkok, menerapkan strategi Westernisasi dan perpecahan, serta terlibat dalam infiltrasi dan sabotase.... Beberapa negara secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, mengancam keamanan perbatasan Tiongkok dan wilayah-

wilayah tetangganya.”<sup>1</sup> Dalam bagian “Menjaga keutuhan wilayah nasional dan hak maritim,” Tiongkok menyatakan bahwa “tugas untuk menjaga kedaulatan teritorial, hak dan kepentingan maritim, serta persatuan nasionalnya sangat berat dan rumit.” Tiongkok merasa “belum mencapai persatuan nasional” tersebut, terutama terkait isu Taiwan yang dianggap sebagai provinsi Tiongkok. Dalam upaya menyatukan kembali Taiwan, Beijing “tidak akan pernah berjanji untuk melepaskan penggunaan kekerasan dan berhak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan.” Artinya, Beijing tetap menganggap jalan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mencapai persatuan nasional.

Keberhasilan Beijing mencapai persatuan nasional bergantung pada dua syarat utama: kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan ketiadaan perlawanan asing. Keamanan nasional Tiongkok hanya dapat dijamin melalui “kepemimpinan absolut” PKT. Buku Putih menyatakan: “Partai memainkan peran kepemimpinan inti dalam mengawasi situasi secara keseluruhan dan mengoordinasikan semua pihak; kepemimpinannya komprehensif, sistematis, dan holistik, meresap ke semua

---

<sup>1</sup> Kantor Informasi Dewan Negara (国务院新闻办公室) Republik Rakyat Tiongkok, *Buku Putih tentang Keamanan Nasional Tiongkok di Era Baru (新时代的中国国家安全白皮书)*, Mei 2025 tersedia daring <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwxbps/16385614.html> (diakses 22 December 2025).

aspek dan seluruh proses kerja keamanan nasional.” Akan tetapi, Beijing merasa kepemimpinan PKT mendapat rongrongan asing, terutama Barat. Ia “harus dengan tegas mencegah kekuatan anti-Tiongkok asing menerapkan strategi Westernisasi dan perpecahan terhadap Tiongkok dengan mempromosikan demokrasi Barat, kebebasan, hak asasi manusia, dan apa yang disebut ‘nilai-nilai universal’; kita harus secara ketat waspada dan menindak tegas segala macam aktivitas infiltrasi dan subversi oleh kekuatan musuh, seperti menghasut ‘revolusi warna’ dan ‘politik jalanan’.”

Penerbitan buku putih tersebut disusul dengan konsep Prakarsa Tata Kelola Global (*Global Governance Initiative*) atau GGI yang Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok meluncurkan pada September 2025. Konsep GGI mengusung kembali inti dari Buku Putih. Terdiri dari 5 “konsep inti”, GGI berfokus pada “pembangunan sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata serta bekerja sama untuk komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.”<sup>2</sup> Artinya, Beijing merasa tata kelola global yang ada selama ini masih belum berlaku adil, setidaknya bagi kepentingannya sendiri yang mengaku

---

<sup>2</sup> Ministry of Foreign Affairs – People’s Republic of China, “Concept Paper on the Global Governance Initiative,” 1 September 2025, tersedia daring [https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202509/t20250901\\_11699912.html](https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202509/t20250901_11699912.html) (diakses 22 December 2025).

tergolong sebagai “negara-negara Selatan” atau negara-negara berkembang. Kepentingan ini sangat terkait dengan misi Beijing untuk menciptakan “kesetaraan kedaulatan” sebagai “premis utama tata kelola global.” Salah satu isinya adalah “bahwa semua negara, terlepas dari ukuran, kekuatan, atau kekayaannya...urusan dalam negerinya bebas dari campur tangan eksternal” dan memiliki “hak untuk secara mandiri memilih sistem sosial dan jalan pembangunan mereka.” Pernyataan ini menyiratkan dua anggapan utama yang terkait erat dengan Buku Putih. Pertama, Beijing bebas dalam menyelesaikan urusan dalam negeri, termasuk Taiwan, dari campur tangan eksternal. Kedua, Beijing berhak menegakkan kewenangan dan dominasi PKT sebagai “sistem sosial” dalam sistem demokrasi partai tunggal.

Melalui dua kacamata ini, kita bisa mengulas kebijakan Beijing terhadap Asia Tenggara sepanjang tahun 2025. Ulasan ini akan mengukur sejauh mana Beijing konsisten melaksanakan isi Buku Putih maupun GGI tersebut. Bagian kedua dari tulisan ini menerangkan gambaran umum keamanan Asia Tenggara di tahun 2025 melalui sengketa Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, Perang Kamboja-Tailan dan Konflik Myanmar serta diplomasi pertahanan Tiongkok di Asia Tenggara. Sebagai kesimpulan, bagian ketiga membahas peluang dan tantangan bagi Indonesia dari peran Tiongkok dalam keamanan Asia Tenggara sepanjang tahun 2025.

## **Keamanan Asia Tenggara**

Tahun 2025 menandakan keamanan lebih suram bagi kawasan Asia Tenggara dengan eskalasi konflik vertikal maupun horizontal. Eskalasi vertikal terjadi ketika konflik berujung pada penggunaan kekerasan bersenjata maupun tidak bersenjata. Sedangkan eskalasi horizontal berarti perluasan konflik secara wilayah, dengan menyeret lebih banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Eskalasi vertikal dan horizontal tampak dalam sengketa Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan serta konflik Kamboja-Tailan dan Myanmar yang melibatkan kekerasan bersenjata.

Dari semua konflik dan sengketa ini, Tiongkok memainkan peranan penting. Di laut, Tiongkok merupakan salah satu pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Namun, penggunaan kekerasan di laut oleh Tiongkok tampak selektif, dengan Filipina sebagai sasaran utama. Sementara itu, beberapa pengamat menilai pendekatan keras ini tidak berlaku bagi negara yang bersengketa lainnya, seperti Vietnam dan Malaysia.<sup>3</sup> Sebabnya beragam, salah satunya karena Tiongkok ingin

---

<sup>3</sup> Koh Swee Lean Collin, "Commentary: Why China has said little about Vietnam's South China Sea build-up," *CNA*, 30 September 2025, tersedia daring <https://www.channelnewsasia.com/commentary/south-china-sea-vietnam-spratly-island-reclamation-5375446> (diakses 29 January 2026).

menjaga ‘muka’ atau citra di hadapan negara-negara ASEAN di tengah tekanan geopolitik negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Sementara itu, muncul juga wacana imbas konflik sengketa Taiwan bagi Laut Cina Selatan mengingat Filipina memiliki laut yang langsung berbatasan dengan pulau tersebut. Terdapat kemungkinan konflik Selat Taiwan akan bereskalasi secara horizontal ke Filipina, terutama potensi serangan Tiongkok terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah negara sekutunya tersebut.

Berbeda dengan konflik di Laut Cina Selatan, Tiongkok tidak terlibat dalam konflik sengketa Kamboja-Tailan, yang bereskalasi vertikal menjadi konflik bersenjata. Dalam konflik ini, Tiongkok ingin menjaga hubungan yang baik dan erat dengan Tailan maupun Kamboja. Selain sebagai salah satu mitra dagang dan investasi terbesar, Tiongkok juga memasok alutsista bagi kedua negara tersebut. Sebagian dari alutsista ini digunakan dalam konflik bersenjata tahun 2025 ini. Menariknya, Tiongkok bertindak sebagai penengah bersama AS. Namun, sebagai pihak penengah, Tiongkok rentan dianggap tidak netral oleh salah satu atau kedua pihak yang bertikai. Begitu pula dengan konflik di Myanmar yang bereskalasi vertikal menjadi perang saudara dan horizontal menjadi sarang tindak kejahatan penipuan terbesar di Asia Tenggara. Tiongkok bermitra dengan

pemerintah Junta Militer maupun pihak oposisi Myanmar untuk memberantas mafia penipuan yang banyak memakan korban warga negara Tiongkok sendiri.<sup>4</sup>

Peran Tiongkok sebagai pemasok alutsista dan penengah konflik Kamboja-Tailan menunjukkan kemajuan diplomasi pertahanan Beijing di kawasan. Diplomasi pertahanan muncul dari tuntutan Beijing untuk meyakinkan negara-negara Asia Tenggara bahwa lonjakan anggaran dan kemampuan militer Beijing bukan ancaman. Dengan kata lain, diplomasi pertahanan bertujuan untuk mencitrakan Beijing sebagai mitra pertahanan dan militer yang lebih bisa diandalkan daripada AS dan mitra-mitra lain.

Dari segi luas wilayah, jumlah penduduk dan produk domestik bruto (PDB), Indonesia merupakan negara terbesar dan terpenting bagi Tiongkok dalam mengelola keamanan Asia Tenggara. Bisa dikatakan, keberhasilan atau kegagalan Tiongkok dalam menanamkan pengaruh di kawasan ini tergantung pada penerimaan, bahkan restu Indonesia. Dalam menyambut kehadiran pengaruh Tiongkok, Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan yang tidak bisa dikelola sendiri sehingga

---

<sup>4</sup> International Institute for Strategic Studies, "The Geopolitics of Southeast Asia's Cyber-scramming crisis," in *The Armed Conflict Survey 2025*, edited by Irene Mia, (London: International Institute for Strategic Studies, 2025), pp. 277–78.

mensyaratkan kerja sama dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

### **Kisruh Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan**

Sengketa wilayah dan perbatasan maritim di Laut Cina Selatan serta Selat Taiwan merupakan persoalan lama. Perkembangan baru dari sengketa ini adalah ketegangan dan konflik yang muncul dari kegagalan tata kelola sengketa tersebut. Tidak setiap sengketa harus berujung pada ketegangan, dan tidak setiap ketegangan berujung pada konflik. Namun, sikap dan kebijakan Tiongkok dalam mengelola sengketa ini justru menimbulkan ketegangan dan konflik. Di Laut Cina Selatan, terdapat tiga perkembangan yang perlu sorotan utama. Pertama, kebijakan Tiongkok dalam mengelola sengketa sehingga memunculkan ketegangan dan konflik baru. Kedua, reaksi dari negara-negara Asia Tenggara sebagai pihak yang bersengketa atau berdekatan dengan letak wilayah sengketa. Ketiga, reaksi dari negara-negara luar Asia Tenggara yang mengaku terdampak oleh ketegangan dan konflik akibat sengketa tersebut.

Perkembangan pertama, ketegangan dari sengketa Tiongkok dan Filipina telah membawa eskalasi vertikal. Pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag memutuskan bahwa peta garis putus-putus Tiongkok yang menjadi dasar pengakuan

kedaulatannya berlawanan dengan prinsip Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNCLOS.<sup>5</sup> Sejak itu pula, Tiongkok makin agresif dalam bergesekan dengan Filipina sebagai pihak penuntut di mahkamah tersebut. Melalui pengerahan kapal penegak hukum dan Angkatan Laut, Tiongkok berupaya mencegah upaya bekal ulang marinir Filipina yang berpangkalan di Second Thomas Shoal.

Tiongkok pun telah menutup akses nelayan Filipina untuk memasuki kawasan Scarborough Shoal atas alasan pelestarian lingkungan laut. Pada 11 Agustus 2025, kapal perang dan penegak hukum Tiongkok saling bertabrakan ketika ingin mengusir kapal penegak hukum Filipina yang sedang patroli di perairan sekitar Scarborough Shoal.<sup>6</sup> Tabrakan ini membuktikan sikap agresif Tiongkok yang bisa menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Muncul dugaan bahwa tabrakan tersebut berakibat pada sejumlah petugas penegak hukum Tiongkok yang tewas maupun luka. Pada 11 September 2025, Tiongkok bahkan menetapkan kawasan itu sebagai cagar alam, meski

---

<sup>5</sup> Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines vs. the People's Republic of China)*, The Hague, 12 July 2016, pp. 1–2.

<sup>6</sup> Novi Christiatuti, “2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina di Laut China Selatan,” *DetikNews*, 11 August 2025, tersedia daring <https://news.detik.com/internasional/d-8055453/2-kapal-china-tabrakan-saat-kejar-kapal-filipina-di-laut-china-selatan> (diakses 22 Desember 2025).

berada di wilayah perairan Filipina menurut putusan PCA.<sup>7</sup> Tiongkok diduga berniat mereklamasi dangkalan di kawasan sekitar Scarborough Shoal untuk kepentingan militer.

Perkembangan kedua, eskalasi vertikal Tiongkok-Filipina tidak atau belum memicu eskalasi horizontal dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang juga bersengketa di Laut Cina Selatan. Malahan, Tiongkok bersikap lebih lunak terhadap negara-negara lain yang bersengketa, seperti Brunei, Malaysia, dan terutama Vietnam. Terdapat setidaknya dua alasan yang mungkin bisa menjelaskan sikap lunak ini. Pertama, negara-negara tersebut tidak ‘mempermalukan’ Tiongkok layaknya Filipina yang menuntut Beijing di PCA. Kedua, negara-negara tersebut tidak memiliki aliansi dengan AS, apalagi mengundang negara-negara mitra dan sekutu AS untuk ‘patroli bersama’ di wilayah perairan yang Beijing sengkatakan sebagaimana yang Filipina telah lakukan. Terlepas dari kedua alasan di atas, negara-negara tersebut justru tampak ‘diuntungkan’ oleh eskalasi vertikal Tiongkok-Filipina yang mengalihkan perhatian Beijing dari wilayah Laut Cina Selatan lainnya. Bagi negara yang tidak bersengketa namun letak wilayahnya berdekatan seperti Indonesia,

---

<sup>7</sup> “Tiongkok ingin bangun cagar alam di Scarborough Shoal,” *Koran Jakarta*, 11 September 2025, tersedia daring <https://koran-jakarta.com/2025-09-11/tiongkok-ingin-bangun-cagar-alam-di-scarborough-shoal> (diakses 22 Desember 2025).

Singapura dan Tailan, sikap mereka cenderung pasif, bahkan cenderung menyudutkan Filipina yang dinilai provokatif terhadap Tiongkok.

Perkembangan ketiga, eskalasi horizontal justru tampak terjadi dengan negara-negara luar Asia Tenggara yang merasa terdampak oleh ketegangan Tiongkok-Filipina di Laut Cina Selatan. Selain AS, yang terikat aliansi dengan Filipina, sekutu-sekutu AS lainnya di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Australia, Jepang, dan Selandia Baru, juga merasakan dampak tersebut. Bersama AS, masing-masing negara sekutu tersebut menerapkan patroli kebebasan pelayaran atau navigasi di Laut Cina Selatan dengan istilah dan ciri khas masing-masing. Pada bulan Oktober 2025, misalnya, Australia mengancam penghadangan pesawat patrolinya oleh pesawat tempur Tiongkok di dekat Kepulauan Paracel. Bagi Australia, penghadangan tersebut mengganggu kebebasan penerbangan.<sup>8</sup> Gesekan ini mengganggu hubungan kedua negara yang lebih dulu tegang akibat latihan AL Tiongkok di Laut Tasman pada bulan Februari 2025. Latihan tersebut mengejutkan tidak hanya Australia, tetapi juga negara tetangganya, Selandia Baru. Pada November 2025,

---

<sup>8</sup> Novi Christiatuti, "Australia Kecam Jet Tempur China Jatuhkan Suar Dekat Pesawatnya," *DetikNews*, 20 Oktober 2025, tersedia daring <https://news.detik.com/internasional/d-8170036/australia-kecam-jet-tempur-china-jatuhkan-suar-dekat-pesawatnya> (diakses 22 Desember 2025).

kapal perang AL Selandia Baru dibayangi oleh tujuh kapal perang Tiongkok ketika melintasi Selat Taiwan dalam perjalanannya menuju Semenanjung Korea.<sup>9</sup>

Terlebih lagi adalah Jepang. Pada bulan yang sama, Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik, Sanae Takaichi, menyatakan dalam parlemen Jepang bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat menyeret Pasukan Bela Diri Jepang ke dalam perang. Pernyataan Takaichi tersebut menuai kecaman dari Tiongkok yang kemudian ‘menghukum’ Jepang secara ekonomi melalui pembatalan sejumlah perjalanan wisata, penundaan penerbangan, dan pembatasan ekspor komoditas tertentu. Bila konflik militer antara Tiongkok dan Taiwan terjadi, kemungkinan besar tidak hanya menyeret AS, tetapi juga Jepang dan Filipina sebagai sekutu dengan jarak terdekat ke Taiwan. Penting untuk dicatat bahwa keterlibatan Filipina akan membuat konflik Selat Taiwan berimbas langsung pada Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan.

Apalagi, hampir sejuta warga negara ASEAN tinggal atau bekerja di Taiwan, terutama dari Indonesia, Filipina dan

---

<sup>9</sup> Inas Rifqia Lainufar, “7 Kapal Perang China Buntuti Kapal Selandia Baru Saat Patroli Laut Asia Timur,” *Kompas.com*, 9 Desember 2025, tersedia daring <https://www.kompas.com/global/read/2025/12/09/145200770/7-kapal-perang-china-buntuti-kapal-selandia-baru-saat-patroli-laut-asia> (diakses 22 Desember 2025).

Vietnam. Menurut Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan sejumlah lebih kurang 300 ribu jiwa beserta ribuan lainnya di Jepang dapat terancam bila perang terjadi.<sup>10</sup> Padahal, tiada satu pun negara ASEAN yang mampu melakukan evakuasi warga negara mereka ketika konflik militer berskala besar semacam ini terjadi. Oleh karenanya, perlukah negara-negara ASEAN bekerja sama satu dengan lainnya, dan juga dengan negara luar kawasan, termasuk Jepang—selain dengan para pihak yang berkepentingan langsung (Tiongkok, AS dan Taiwan)—guna membantu evakuasi warga negara mereka? Bila perlu, bagaimana bentuk kerja sama yang bisa dilakukan tanpa melanggar prinsip Satu Tiongkok (*One-China policy*)?

### **Perang Kamboja—Tailan dan Konflik Myanmar**

Belum selesai kisruh Laut Cina Selatan, muncul persoalan keamanan baru. Konflik Myanmar telah bereskalasi secara horizontal dengan menyeret keterlibatan Tiongkok, terlepas dari keengganan Beijing sendiri. Para pihak yang terlibat dalam perang saudara Myanmar, terutama pihak

---

<sup>10</sup> “Ketegangan China-Jepang Memanas, Pakar dan Praktisi Ingatkan Indonesia Tetap Netral,” *JPNN*, 10 Desember 2025, <https://www.jpnn.com/news/ketegangan-chinajepang-memanas-pakar-dan-praktisi-ingatkan-indonesia-tetap-netral?page=2> (diakses 29 Januari 2026).

junta, mendanai perang tersebut dari tindak kejahatan terorganisir, seperti penipuan dan perjudian skala besar. Warga negara Tiongkok menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak kejahatan ini. Aparat Tiongkok bertindak tegas dengan mencari pelaku dan membebaskan/melindungi korban. Akan tetapi, tindakan tegas ini hanya bisa dilakukan melalui kerja sama atau setidaknya restu pihak pemerintah atau oposisi Myanmar. Artinya, Tiongkok tetap memiliki pengaruh, bahkan terlibat dalam konflik Myanmar meski ia mengambil sikap netral. Pertanyaannya, sekuat apa tekad Tiongkok untuk menghentikan konflik ini? Pihak mana yang Beijing istimewa atau anggap sebagai mitra dengan risiko politik terkecil bagi kepentingannya?

Netralitas semu Tiongkok tersebut tidak hanya terjadi dalam konflik di Myanmar. Sengketa perbatasan Kamboja-Tailan berujung pada ketegangan yang memicu krisis diplomatik dan konflik bersenjata. Tiongkok menekankan netralitasnya dalam konflik ini dan menyerukan kedua pihak untuk menahan diri. Artinya, posisi resmi Tiongkok adalah tidak terlibat (*non-intervention*). “Tiongkok telah lama menjalin kerja sama pertahanan normal dengan Tailan dan Kamboja,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> ANTARA, “China bantah pasok senjata ke Kamboja dalam bentrokan dengan Thailand,” 18 Desember 2025, tersedia daring <https://www.antaraneews.com/berita/5310736/china-bantah-pasok->

“Kerja sama ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga mana pun dan tidak memiliki kaitan dengan bentrokan perbatasan saat ini antara Tailan dan Kamboja,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Kemlu Tiongkok membantah telah memasok senjata ke Kamboja. Pernyataan itu muncul setelah Tailan menemukan banyak senjata anti-tank Kamboja yang berasal dari Tiongkok.<sup>12</sup> Kenyataannya, Tiongkok merupakan mitra pertahanan dan militer bagi kedua negara, termasuk sebagai pemasok alutsista sebelum pecahnya konflik bersenjata. Pengerahan alutsista Tiongkok oleh Tailan maupun Kamboja telah berujung pada eskalasi vertikal.

Walau Tiongkok mengaku tidak terlibat, ia tetap memiliki andil dalam meredam konflik bersenjata. Sebagai perbandingan, AS mengancam akan menjatuhkan sanksi berupa tarif dagang kepada para pihak yang bertikai. Sejauh ini, belum ada isyarat Tiongkok akan menjatuhkan sanksi, apalagi embargo alutsista kepada kedua pihak. Belum dapat dipastikan bahwa penjualan alutsista ini terputus sama sekali, khususnya dalam pemeliharaan dan logistik. Beberapa alutsista Kamboja, seperti tank dan

---

[senjata-ke-kamboja-dalam-bentrokan-dengan-thailand](#) (diakses 22 Desember 2025).

<sup>12</sup> “Kemenhan Tiongkok Tanggapi Informasi Negatif Terkait Tiongkok dalam Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand,” *CGTN*, 19 December 2025, tersedia daring <https://indonesian.cri.cn/2025/12/19/ARTI1766107722106102> (diakses 22 Desember 2025).

kendaraan lapis baja, memerlukan suku cadang dan amunisi Tiongkok. Apakah Tiongkok telah betul-betul menghentikan pemeliharaan dan dukungan logistik alutsista kepada Tailan dan Kamboja meski tidak ada penjualan/pasokan alutsista baru? Hingga tulisan ini dibuat, belum tampak Tiongkok menjelaskan keterangan, apalagi ketegasan tentang kemungkinan ini. Bila pun Tiongkok betul-betul memotong rantai pasok alutsista ini, termasuk pemeliharaan dan dukungan logistik seperti suku cadang dan amunisi, maka Kamboja akan jadi pihak yang paling dirugikan. Phnom Penh amat bergantung pada alutsista Tiongkok sebagai pemasok utama. Sebuah laporan Tailan menyebutkan bahwa sekitar 90% alutsista Kamboja berasal dari Tiongkok.<sup>13</sup> Bila rantai tersebut putus, besar kemungkinan Tailan makin unggul dalam pertempuran. Dibandingkan dengan Kamboja, Tailan memiliki pemasok alutsista yang lebih beragam sehingga kurang bergantung pada Tiongkok semata.

### **Diplomasi Pertahanan dan Modernisasi Militer Tiongkok**

Selain menjadi mitra dagang terbesar Asia Tenggara, Tiongkok juga menawarkan kemitraan pertahanan dan keamanan. Beijing menilai bahwa keamanan nasionalnya hanya terjamin bila pengaruh AS dan sekutunya makin

---

<sup>13</sup> “Thai-Cambodia border clash exposes expanding arms pipeline,” *The Nation*, 17 December 2025, tersedia daring <https://asianews.network/thai-cambodia-border-clash-exposes-expanding-arms-pipeline/> (diakses 22 Desember 2025).

memudar di Asia Tenggara. Kemitraan tersebut terbangun melalui diplomasi pertahanan yang dilaksanakan dalam berbagai kerja sama militer, termasuk pasokan alutsista. Pasokan ini menjadi sebagian penyebab eskalasi konflik secara vertikal maupun horizontal. Laporan FSI bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama pertahanan dan militer Tiongkok di Asia Tenggara meningkat pesat dalam 20 tahun terakhir.<sup>14</sup> Demikian pula temuan pakar Philip Saunders dan Melodie Ha dari Universitas Pertahanan Nasional AS. Mereka menilai “Asia Tenggara telah berkembang sebagai medan pertempuran persaingan AS-Tiongkok dalam diplomasi militer.”<sup>15</sup> Militer Tiongkok atau PLA telah menambah frekuensi latihan dengan negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia dan bahkan Filipina yang memiliki sengketa wilayah dengan Beijing. Menurut laporan Pemerintah AS, “Tiongkok telah lama memandang Asia Tenggara sebagai ‘halaman belakangnya’ dan ingin menanamkan keunggulan ekonomi dan militer di kawasan ini sebagai bagian dari

---

<sup>14</sup> Ristian Atriandi Supriyanto dan Priska Limandar, “China’s Defence Diplomacy in Southeast Asia: Opportunities and Challenges for Indonesia,” *Forum Sinologi Indonesia*, 24 Maret 2025 tersedia daring <https://www.forumsinologi.id/fsi-analysis/chinas-defence-diplomacy-in-southeast-asia-opportunities-challenges-for-indonesia> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>15</sup> Phillip C. Saunders dan Melodie Ha, "Chinese Military Diplomacy" *China Strategic Perspectives*, 19, (2025), tersedia daring <https://digitalcommons.ndu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=china-strategic-perspectives> (diakses 22 Desember 2025).

siasat besarnya untuk melemahkan kekuatan AS di Indo-Pasifik.” Semua ini Beijing lakukan demi menjadi “hegemon [adikuasa tunggal] di kawasan” dengan “merusak citra AS di kalangan pejabat dan rakyat negara-negara Asia Tenggara.”<sup>16</sup> Selain melalui pendekatan “kuasa lunak” (*soft power*), upaya Beijing ini terbantu melalui kebijakan dagang dan bantuan luar negeri Presiden AS Donald Trump yang dianggap merugikan banyak negara Asia Tenggara.

Semua ini bisa Beijing lakukan berkat modernisasi PLA yang pesat. Menurut Kementerian Pertahanan AS, Beijing melakukan modernisasi militer di seluruh matra peperangan darat, laut, udara, namun juga nuklir, antariksa, anti-antariksa, peperangan elektronik, dan ruang siber.<sup>17</sup> Tiongkok memiliki angkatan laut (AL) terbesar di dunia dengan lebih dari 370 kapal, termasuk 140 kapal perang permukaan. Dengan kemampuan ini,

---

<sup>16</sup> U.S.-China Economic and Security Review Commission, “Crossroads of Competition: China and Southeast Asia,” 17 November 2025, tersedia daring [https://www.uscc.gov/sites/default/files/2025-11/Chapter\\_4--Crossroads\\_of\\_Competition\\_China\\_and\\_Southeast\\_Asia.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/2025-11/Chapter_4--Crossroads_of_Competition_China_and_Southeast_Asia.pdf) (diakses 22 Desember 2025).

<sup>17</sup> U.S. Department of Defense, “Military and Security Development Involving The People’s Republic of China 2024,” 18 Desember 2024, tersedia daring <https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2024.PDF> (diakses 22 Desember 2025).

Beijing bisa saja mengirim lebih banyak misi muhibah AL daripada AS ke negara-negara Asia Tenggara. Bahkan, Beijing memamerkan keunggulan pesawat tempur andalannya, J-10, yang digunakan Pakistan untuk menembak jatuh sedikitnya satu pesawat Rafale India buatan Prancis.<sup>18</sup> Ekspor alutsista Tiongkok, seperti ke Indonesia, tentu tidak hanya sekadar memamerkan keunggulan teknologi, tetapi juga mengikat negara-negara pembeli dan penerima alutsista tersebut dengan rantai pasok Beijing yang sarat kepentingan politik untuk mengucilkan peran AS beserta sekutunya. Ikatan seperti ini bisa melanggar prinsip ‘bebas aktif’ Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negeri non-blok. Selain itu, bila ketergantungan Jakarta terhadap Beijing meningkat, kritik Indonesia atas klaim sepihak Tiongkok di Laut Cina Selatan berisiko memudar.

### **Peluang dan Tantangan Indonesia**

Bagi Indonesia, peran Tiongkok dalam keamanan Asia Tenggara di tahun 2025 membawa peluang sekaligus tantangan. Dari segi peluang, Tiongkok menjadi mitra dalam menghadapi ancaman keamanan nontradisional atau yang pelakunya non-negara. Memang, sebagian

---

<sup>18</sup> John Leicester, “French Intelligence: China used embassies to undermine sales of France’s flagship Rafale fighter jet,” *Associated Press*, 6 July 2025, tersedia daring <https://apnews.com/article/france-china-pakistan-india-defense-rafale-64eec86b6e89718d6a49d8fdedf565f4> (diakses 22 Desember 2025).

besar latihan militer Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara menyorot bentuk ancaman semacam ini, seperti penanggulangan bencana alam, kontra-terorisme dan anti-pembajakan udara maupun laut. Indonesia sendiri telah memulai kembali latihan bersama tahunan dengan Tiongkok pada akhir tahun 2024 dengan skenario penanggulangan bencana. Pada 21 April 2025, Indonesia dan Tiongkok bahkan menggelar pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Pertahanan (atau ‘2+2’) mereka untuk pertama kalinya. Pertemuan yang berlangsung di Beijing tersebut merupakan pertemuan pertama yang Beijing lakukan dengan negara Asia Tenggara.<sup>19</sup> Meski tampak memperkuat mekanisme dialog antara kedua negara—terutama nilai strategis Jakarta di mata Beijing—pertemuan ini juga menyingkap banyak perbedaan kepentingan dan prioritas, termasuk kritik Indonesia terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan.<sup>20</sup>

Kehadiran Tiongkok juga memberi tantangan bagi Indonesia. Asia Tenggara menjadi medan pertarungan

---

<sup>19</sup> Hao Nan, “China’s First 2+2 with Indonesia: A Symbolic Shift in Diplomatic Strategy,” *The Diplomat*, 25 April 2025, tersedia daring <https://thediplomat.com/2025/04/chinas-first-22-with-indonesia-a-symbolic-shift-in-diplomatic-strategy/> (diakses 22 Desember 2025).

<sup>20</sup> Ristian Atriandi Supriyanto, “Pertemuan ‘2+2’ dalam Diplomasi Pertahanan China-Indonesia,” *Forum Sinologi Indonesia*, 7 September 2025, tersedia daring <https://www.forumsinologi.id/opinion/pertemuan-22-dalam-diplomasi-pertahanan-china-indonesia> (diakses 22 Desember 2025).

makin sengit antara Beijing dan Washington. Kedekatan beberapa negara Asia Tenggara dengan Tiongkok bisa membuat Beijing makin percaya diri dalam merebut berbagai kepentingan geopolitiknya, seperti di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Beijing akan merasa yakin bahwa Asia Tenggara tidak akan mau atau mampu melawan rencananya untuk menekan pengaruh AS beserta sekutunya di kawasan. Akibatnya, Tiongkok bisa saja melakukan salah perhitungan. Dengan kepercayaan negara-negara Asia Tenggara atas keunggulannya, Beijing akan makin berani menolak kehadiran militer AS dan berusaha menyelesaikan sengketa secara sepihak, seperti dengan Filipina di Laut Cina Selatan. Keberanian Tiongkok ini bisa mengancam Indonesia yang letaknya berdekatan dan berbatasan dengan wilayah kemungkinan pecahnya konflik AS-Tiongkok. Untuk itu, penting sekali bagi Indonesia untuk meyakinkan Beijing bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang harus bebas dari tekanan negara-negara luar mana pun—termasuk AS—dalam menentukan sikap dan pendiriannya. Peningkatan kerja sama pertahanan dan militer dengan Beijing bukan menunjukkan Indonesia yang tunduk pada kepentingan Tiongkok. Sebaliknya, kerja sama tersebut harus menegaskan kepentingan Indonesia dalam menjamin perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara di tengah kemelut persaingan AS—Tiongkok yang makin sengit.

# **Refleksi Hubungan Tiongkok—Indonesia 2025: Aspek Perdagangan dan Investasi**

Muhamad Iksan dan Muhammad Farid

## **Ringkasan Utama**

- Hubungan Tiongkok dan Indonesia pada bidang perekonomian meliputi perdagangan, infrastruktur, dan investasi memasuki tahap kesalingtergantungan yang semakin intens di tahun 2025. Hal ini wajar adanya karena sejak Tiongkok meluncurkan BRI tahun 2013, hubungan ekonomi perdagangan Sino-Indonesia berhasil mencetak kesepakatan-kesepakatan baru yang konkret dan dapat dieksekusi sesuai rencana kedua pihak.
- Tiongkok memerlukan Indonesia untuk menyuplai bahan-bahan mentah, seperti nikel, batu bara, maupun minyak kelapa sawit guna bahan baku pabrik-pabrik manufaktur di daratan Tiongkok. Ekspor Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Namun, impor barang-barang dengan harga murah dari Tiongkok, baik berupa produk tekstil maupun produk-produk lainnya, menjadi tantangan bagi produsen dalam negeri Indonesia.
- Ulasan ringkas mengenai pengalaman Indonesia dalam Proyek Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung dan Moratorium Nikel oleh pemerintah Indonesia

memperlihatkan bahwa Indonesia perlu menyusun langkah strategis dalam merencanakan dan menjalankan kerja sama investasi dengan Tiongkok. Namun, di sisi lain, kebijakan yang menekankan pentingnya transfer teknologi merupakan kebijakan yang tepat dan patut diapresiasi.

- Hubungan Indonesia—Tiongkok dapat menjadi peluang bagi Indonesia bila kedua negara dapat menciptakan dan menjaga kesalingtergantungan antara kedua belah pihak. Kesalingtergantungan ini salah satunya dapat dicapai bila Indonesia memperluas kebijakan diversifikasi, baik dalam hal perdagangan maupun penerimaan investasi luar negeri.

## **Latar Belakang**

Artikel ini membahas hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut RRT atau Tiongkok) dengan Indonesia pada tahun 2025, dengan penekanan pada isu perdagangan bilateral kedua negara, dukungan investasi dari Tiongkok, serta pengembangan infrastruktur atau konektivitas di antara kedua negara ini. Dalam memberikan gambaran besar, artikel ini mengambil data yang dipaparkan oleh Xu Chengwei dan Lim Guanie dalam salah satu makalah mereka.<sup>1</sup> Kedua

---

<sup>1</sup> Chengwei Xu & Guanie Lim, "Global Britain, Belt and Road Initiative, and New Southbound Policy: Which One Matters to

penulis tersebut membahas dinamika *Foreign Direct Investment* (FDI atau Penanaman Modal Asing/PMA) di kawasan Asia Timur—meliputi Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan—serta menelaah bagaimana perubahan geopolitik, kerentanan dalam rantai pasok, dan strategi keamanan ekonomi membentuk pola investasi antarnegara.<sup>2</sup> Penelitian keduanya bermaksud untuk: (1) menelusuri perkembangan arus FDI keluar dari keempat perekonomian utama di Asia Timur; (2) mengkaji pengaruh ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi terhadap penentuan lokasi investasi; dan (3) menilai konsekuensinya bagi integrasi regional dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian keduanya mengungkap bahwa pola FDI dari Asia Timur telah mengalami perubahan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok menunjukkan lonjakan signifikan dalam *outward* FDI, khususnya yang berinvestasi ke sektor energi, teknologi, dan infrastruktur di berbagai negara berkembang. Berdasarkan temuan dari Xu dan Lim, sebelum Krisis Keuangan Global 2008, Inggris merupakan investor terbesar di Asia Tenggara, bahkan mengungguli Tiongkok dan Taiwan. Namun, setelah krisis, dominasi Inggris

---

Southeast Asia?," GRIPS Discussion Papers 24-05, 2024, National Graduate Institute for Policy Studies.

<sup>2</sup> Dalam artikel ini, penggunaan istilah FDI dan PMA akan digunakan secara bergantian.

menurun cukup tajam. Sebaliknya, Tiongkok meningkat pesat sebagai investor utama di kawasan tersebut setelah 2008, terutama melalui arus FDI yang mengalir ke negara-negara tetangganya, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Peningkatan arus modal dari Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terus berlangsung hingga hari ini. Meski pemerintah Tiongkok menerapkan kontrol modal domestik sejak tahun 2017, modal asal Tiongkok tetap mengalir ke kawasan ini. Pada kuartal ketiga tahun 2025 saja, investasi Tiongkok ke Indonesia mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat (US\$), belum termasuk US\$2,7 miliar investasi asal Hong Kong.<sup>3</sup> Bila digabungkan, Hong Kong dan Tiongkok menjadi tempat asal investasi yang terbesar bagi Indonesia.

Dalam konteks di ataslah hubungan ekonomi antara Tiongkok, Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi penting untuk dipelajari, antara lain melalui upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana hubungan ekonomi, baik perdagangan maupun investasi, antara Tiongkok dan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir dan tahun ini? Apa yang dapat dipelajari dari

---

<sup>3</sup> Robertus Andrianto, “BKPM: Investasi Asing Masuk RI Sebesar Rp 212 T Kuartal III-2025,” CNBC Indonesia, 17 Oktober 2025, tersedia daring <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251017091406-4-676675/bkpm-investasi-asing-masuk-ri-sebesar-rp-212-t-kuartal-iii-2025> (diakses 25 Desember 2025).

hubungan tersebut untuk kepentingan Indonesia? Artikel singkat ini mencoba untuk menampilkan pembahasan singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut.

### **Tiongkok dan Asia Tenggara: Jalur Perdagangan Ekspor dan Impor**

Hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Asia Tenggara dapat dipahami antara lain dengan menganalisis dokumentasi data perdagangan ekspor maupun impor di laman *Atlas Economic Complexity*.<sup>4</sup> Sumber data tersebut berasal dari sumber-sumber primer yang kredibel dan dikurasi secara teliti oleh para ekonom yang menekuni perdagangan internasional atau ekonomi internasional. Oleh karenanya, validitas dan reliabilitas data di atas dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>4</sup> *Atlas of Economic Complexity* menawarkan alat visualisasi data pemenang penghargaan yang memungkinkan orang untuk menjelajahi arus perdagangan global di berbagai pasar, melacak dinamika ini dari waktu ke waktu, dan menemukan peluang pertumbuhan baru untuk setiap negara. Dikembangkan di Harvard Kennedy School of Government, platform ini didukung oleh riset Growth Lab Harvard dan merupakan alat unggulan dari The Viz Hub, portofolio alat visualisasi Growth Lab. Data terakhir yang dapat diakses untuk tahun 2023. Namun patut disayangkan, data untuk tahun 2024 dan 2025 belum tersedia.





turut membentuk bagian penting dari perdagangan kawasan itu dengan Tiongkok. Mesin dan komponen elektronik hadir dalam porsi lebih kecil, mencerminkan keterlibatan Asia Tenggara dalam rantai pasokan industri, namun tetap terbatas dibandingkan dengan dominasi komoditas sumber daya alam.

Peta pohon di atas juga menampilkan segmen besar berupa “*trade data discrepancies*” yang menunjukkan adanya selisih pencatatan antara data ekspor ASEAN dan data impor Tiongkok. Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan ketergantungan kuat kawasan pada ekspor berbasis sumber daya alam dan kebutuhan industri Tiongkok yang terus berkembang.

Meski laman *Atlas Economic Complexity* hanya menampilkan data hingga tahun 2023, tren yang digambarkan tampaknya terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. Hingga pertengahan tahun 2025, misalnya, ekspor dari negara-negara ASEAN ke Tiongkok masih didominasi oleh produk-produk agrikultur dan hasil tambang.<sup>5</sup> Sementara mesin dan komponen elektronik masih menempati porsi kecil dari ekspor Asia Tenggara ke Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok masih mendominasi

---

<sup>5</sup> Zhong Nan, “China-ASEAN trade cruising in high gear,” *China Daily*, 5 September 2025, tersedia daring <https://global.chinadaily.com.cn/a/202509/05/WS68ba4674a3108622abc9f06e.html> (diakses 25 Desember 2025).

ekspor alat-alat berat seperti generator listrik dan alat-alat konstruksi.<sup>6</sup>

Bagaimana implikasi kedua data ekspor-impor tersebut bagi Indonesia? Sekurangnya terdapat dua hal yang penting untuk dicatat. Pertama, ketergantungan tinggi pada ekspor berbasis sumber daya alam memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia input vital bagi industri Tiongkok—khususnya baja, energi, petrokimia, dan manufaktur berat. Namun, dominasi komoditas primer juga membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas harga global, perubahan kebijakan impor Tiongkok, serta dinamika transisi energi yang dapat menurunkan permintaan batu bara dan bahan bakar fosil.

Kedua, tingginya porsi ekspor logam seperti *ferroalloys* dan nikel mencerminkan keberhasilan kebijakan hilirisasi Indonesia, tetapi sekaligus menandakan bahwa rantai pasok masih terkonsentrasi pada tahap pengolahan menengah dan belum mencapai tingkat manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti baterai atau komponen elektronik.

Tantangan lain bagi Indonesia datang dari masifnya produk-produk murah manufaktur dari Tiongkok, seperti tekstil atau pakaian bekas. Banjir pakaian bekas ini tidak lepas dari penurunan tarif impor, dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional, baik antarkedua

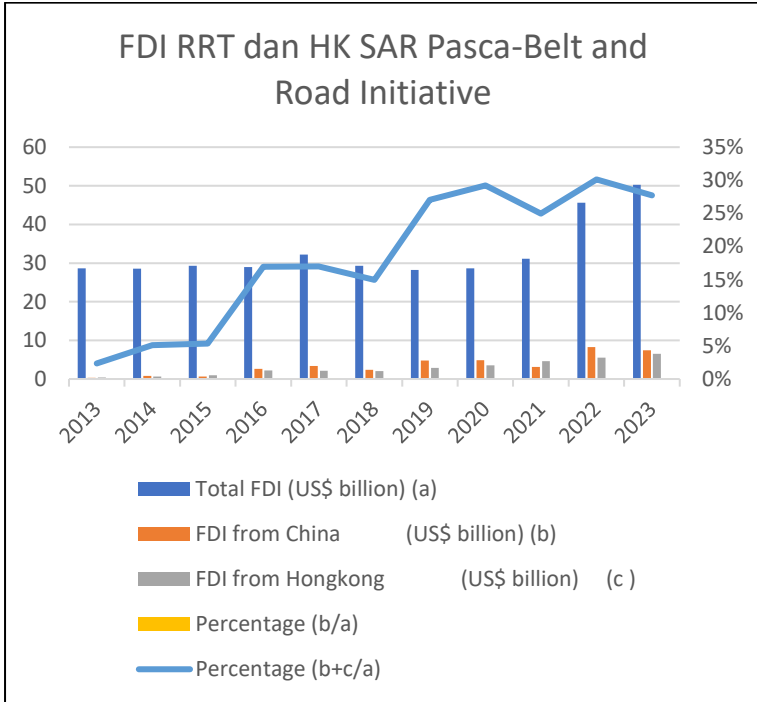
---

<sup>6</sup> Ibid.

negara–Tiongkok dan Indonesia–maupun perjanjian multilateral, seperti *China–ASEAN Free Trade* (CAFTA) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 dan diperbaharui serta diperluas dalam negosiasi CAFTA 3.0 pada Oktober 2024, maupun *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang telah ditandatangani pada 15 November 2020, dan mulai berlaku khusus di Indonesia per 2 Januari 2023. Implikasi dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah berkurangnya secara drastis hambatan tarif impor yang menjadi penghalang bagi kedatangan barang impor murah di atas.

Sebelum artikel ini menyoroti hubungan ekonomi Indonesia—RRT tahun 2025, penting untuk melihat kembali kebijakan luar negeri Tiongkok ke dunia, yaitu Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative*, selanjutnya disebut BRI). BRI, yang diumumkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013, telah menjadi pilar utama diplomasi global Tiongkok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan integrasi ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara mitra sehingga mendorong pertumbuhan dan kemakmuran. Melalui program ini, Tiongkok menawarkan sumber daya keuangan, teknologi, serta sumber daya manusia sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang. Gambar 3

merekam arus investasi asing masuk pasca-BRI yang berasal dari RRT dan Hong Kong.



Gambar 3: Nilai FDI RRT dan Hong Kong ke Indonesia pasca-BRI, dikutip dari Siwage Dharma Negara, “Revisiting the Belt and Road Initiative in Indonesia: Progress, Challenges, and Prospects.” *Journal of Southeast Asian Economies* 41, no.1, 2024.

Gambar di atas menunjukkan bahwa FDI dari Tiongkok meningkat secara signifikan sejak tahun 2016 dan mencapai 18 persen dari total FDI pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 15 persen akibat perlambatan ekonomi Tiongkok. Menariknya, FDI dari Hong Kong justru meningkat setelah pandemi, dari sekitar US\$2,9 miliar pada tahun 2019 menjadi US\$6,5 miliar pada tahun 2023. Jika Hong Kong dihitung sebagai bagian dari Tiongkok, pangsa FDI yang berasal dari Tiongkok dan Hong Kong terhadap total FDI yang masuk ke Indonesia melonjak menjadi 28 persen.

### **Hubungan Tiongkok dengan Indonesia: Dua Studi Kasus**

Hubungan ekonomi yang meliputi aktivitas investasi, perdagangan, maupun pembangunan infrastruktur Tiongkok—Indonesia akan dibahas melalui dua studi kasus yang menjadi representasi atau ilustrasi hubungan kedua negara pada tahun 2025, juga terkait dengan proyek yang telah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Hubungan Tiongkok—Indonesia pada tahun ini sedapatnya memerlukan pembahasan mendalam menggunakan studi kasus sebagai berikut:

#### ***(1) Whoosh Selesai; Namun, Apa Langkah Selanjutnya?***

Dapat dikatakan bahwa proyek BRI yang paling dikenal di Indonesia adalah Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau

*Whoosh.* Meski Kereta Cepat ini telah beroperasi sejak Oktober 2023, penyelesaian proyek ini mengalami keterlambatan dari rencana semula. Selain keterlambatan, proyek tersebut juga mengalami pembengkakan biaya yang sangat signifikan. Biaya proyek yang pada perkiraan awal berjumlah sebesar US\$5,5 miliar pada akhirnya meningkat menjadi sebesar US\$7,3 miliar.<sup>7</sup> Nilai investasi yang menjadi patokan pihak Indonesia dan RRT adalah sebesar 114,4 triliun rupiah.<sup>8</sup>

Pembengkakan biaya di atas memaksa pemerintah menyuntikkan tambahan modal ke dalam konsorsium badan usaha milik negara yang bertanggung jawab mengelola proyek tersebut. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan awal bahwa proyek tersebut tidak akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun demikian, keputusan kebijakan ini tampak tidak terelakkan. Pandemi Covid-19 selama dua tahun juga mengganggu pelaksanaan proyek. Jika dilihat kembali, tanpa dukungan politik yang kuat dari Jakarta dan Beijing, megaprojek ini kemungkinan besar akan terhenti.

---

<sup>7</sup> Siwage Dharma Negara, “Revisiting the Belt and Road Initiative in Indonesia: Progress, Challenges, and Prospects.” *Journal of Southeast Asian Economies* 41, no. 1, 2024, pp. 28–46. <https://www.jstor.org/stable/27306813>.

<sup>8</sup> Faisal Basri, “Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” makalah yang dipresentasikan pada webinar bertajuk “Beban Utang Kereta Api Cepat di APBN,” di Universitas Paramadina, 17 Oktober 2023.

Namun, pasca beroperasinya kereta cepat di atas, pihak pemerintah Indonesia justru menghadapi tantangan yang cukup signifikan: bagaimana membayar utang pemerintah Indonesia terhadap kreditor, dalam hal ini China Development Bank (CDB)? Mengenai hal ini, ekonom senior Faisal Basri pernah menyampaikan simulasi sebagai berikut: Berdasarkan perhitungan pendapatan penumpang, dengan asumsi 601 kursi, 36 perjalanan per hari, tingkat operasi penuh sepanjang tahun, dan tarif Rp300.000 per penumpang, potensi pendapatan tahunan diperkirakan mencapai sekitar Rp2,369 triliun.<sup>9</sup> Dengan besaran pendapatan tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk menutup nilai investasi semata diperkirakan mencapai 48,3 tahun. Periode pengembalian investasi akan semakin panjang apabila asumsi berubah. Misalnya, bila tingkat keterisian kursi hanya 75 persen, waktu pengembalian akan mengalami perpanjangan menjadi sekitar 64 tahun. Demikian juga, bila frekuensi perjalanan berkurang menjadi 30 trip per hari, periode pengembalian akan meningkat menjadi 77,3 tahun.

Tingginya beban utang pemerintah Indonesia terhadap pihak Tiongkok pasca penyelesaian proyek Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menolak penggunaan

---

<sup>9</sup> Ibid.

APBN untuk pembayaran utang di atas,<sup>10</sup> meskipun dalam perkembangannya isu mengenai pembayaran utang ini masih terus didiskusikan.<sup>11</sup> Pengalaman dari proyek *Whoosh* ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola investasi asing, termasuk dalam hal kelanjutan kereta api cepat tahap kedua di Pulau Jawa yang menurut sementara pihak berpeluang untuk dikerjakan melalui kerja sama dengan Tiongkok.

***(2) Dari Peringkat Satu Produksi ke Moratorium Nikel: Implikasinya bagi Investor Tiongkok***

Lonjakan signifikan produksi nikel di Indonesia dipicu oleh diberlakukannya Undang-undang Pertambangan yang baru pada tahun 2009, yang selanjutnya diperkuat dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Perkembangan fasilitas hilirisasi nikel di Indonesia menunjukkan pergeseran yang jelas menuju produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi, seiring dengan masuknya para pelaku perintis utama di sektor ini. Tsingshan menjadi pelopor dalam penerapan teknologi

---

<sup>10</sup> Nicha Muslimawati dan Argya D. Maheswara, “Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN,” *Kumparan*, 12 Oktober 2025, tersedia daring <https://kumparan.com/kumparanbisnis/purbaya-tolak-bayar-utang-whoosh-pakai-apbn-261q2wwtg3l/full> (diakses 25 Desember 2025).

<sup>11</sup> Muhammad Idris, “Dulu Tegas Tolak APBN untuk Whoosh, Apa Sikap Purbaya Kini?” *Kompas*, 17 November 2025, tersedia daring <https://money.kompas.com/read/2025/11/17/102258926/dulu-tegas-tolak-apbn-untuk-whoosh-apa-sikap-purbaya-kini> (diakses 25 Desember 2025).

*Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) untuk memproduksi *nickel pig iron* (NPI) dan baja nirkarat, sekaligus mengembangkan konversi NPI menjadi nikel matte.

Sementara itu, Lygend dan Huayou berperan penting dalam pengembangan teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) untuk mengolah nikel kadar rendah. Lygend juga memperkuat posisinya melalui fasilitas HPAL yang terintegrasi dengan produksi nikel sulfat. Adapun Huayou mengembangkan fasilitas hilirisasi yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari HPAL yang menghasilkan *mixed hydroxide precipitate* (MHP), nikel sulfat, hingga *precursor cathode active material* (pCAM). Lebih lanjut, pada tahun 2025, Huayou bersama Tsingshan membangun kilang pemurnian di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk mengonversi MHP menjadi nikel elektrolitik, yang semakin memperkuat rantai nilai industri nikel nasional.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi untuk menghentikan pemberian izin usaha industri (IUI) baru bagi smelter nikel yang hanya memproduksi NPI, feronikel (FeNi), nikel matte, atau MHP.<sup>12</sup> Izin baru hanya

---

<sup>12</sup> Zintan Prihatini dan Bambang P. Jatmiki, “Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi,” Kompas, 15 November 2025, tersedia daring <https://lestari.kompas.com/read/2025/11/15/143511186/celios-pembatasan-izin-smelter-harus-disertai-regulasi-dan-peta> (diakses 25 Desember 2025).

akan diberikan apabila smelter tersebut mampu melakukan pengolahan, pemurnian, atau konversi lebih lanjut atas NPI, FeNi, nikel matte, atau MHP menjadi produk hilir yang lebih lanjut, setidaknya berupa baja nirkarat atau nikel sulfat. Kebijakan ini membawa dampak positif bagi Indonesia karena memberikan tantangan bagi investor asal Tiongkok untuk berkontribusi lebih dari sekadar investasi, tetapi juga melaksanakan transfer teknologi kepada Indonesia bila ingin terus berpartisipasi dalam industri nikel di Tanah Air.

### **Peluang dan Tantangan dari Hubungan Indonesia— Tiongkok**

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa berkaca dari apa yang sudah berlangsung hingga tahun 2025, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sebenarnya masih memiliki peluang sekaligus tantangan. Dalam pandangan kami, peluang akan terus terbuka bila Indonesia berhasil menciptakan dan mempertahankan kesalingtergantungan (*interdependency*) dengan Tiongkok. Namun demikian, interdependensi antara kedua negara tersebut masih pada tahap pengupayaan mengingat kondisi yang saat ini berlangsung dapat dipetakan sebagai berikut:

*Pertama*, Indonesia memiliki ketergantungan perdagangan yang tinggi terhadap Tiongkok, terutama untuk ekspor komoditas seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit, serta impor barang manufaktur. Sebaliknya,

ketergantungan Tiongkok terhadap Indonesia bersifat menengah karena Indonesia bukan satu-satunya pemasok global bagi Tiongkok.

*Kedua*, ketergantungan Indonesia terhadap FDI Tiongkok tergolong tinggi, khususnya di sektor hilirisasi mineral dan energi. Bagi Tiongkok, Indonesia hanya merupakan salah satu dari banyak tujuan investasi sehingga tingkat ketergantungannya rendah.

*Ketiga*, rantai pasok industri Indonesia sangat terhubung dengan *input* dari Tiongkok sehingga ketergantungannya tinggi. Sebaliknya, Indonesia merupakan pemasok penting bagi Tiongkok (misalnya nikel), namun masih bersifat menengah karena ada alternatif global lain. Dengan demikian, tantangan bagi Indonesia adalah mengurangi derajat ketergantungan *hanya* pada perdagangan, investasi asing langsung dari Tiongkok, maupun rantai pasok yang berasal dari *input* dari Tiongkok. Diversifikasi menjadi kuncinya. Peluang Indonesia guna mencari solusi dari tantangan yang dikemukakan sebelumnya, pada hemat kami, cukup terbuka lebar karena potensi sumber daya alam dan manusia yang masih belum dioptimalkan cukup besar.

## Hubungan RI—RRT Tahun 2025 dalam Tinjauan Historis

R. Tuty Nur Mutia

### Ringkasan Utama

- Hubungan RI—RRT pada 2025 dianalisis melalui pendekatan historis yang menempatkan dinamika kontemporer dalam lintasan panjang kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era pasca-Reformasi. Analisis ini menunjukkan bahwa relasi Indonesia—Tiongkok dibentuk oleh pola kesinambungan yang kuat di tengah perubahan konteks internasional.
- Pergantian kepemimpinan nasional dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar pada 2025 dipahami sebagai fase penyesuaian dalam pola historis tersebut. Indonesia tetap mengombinasikan keterlibatan ekonomi dengan kehati-hatian politik dan keamanan guna menjaga otonomi kebijakan luar negeri. Praktik ini dibaca melalui konsep *strategic hedging* sebagai lensa analitis, bukan sebagai kerangka normatif.
- Secara historiografis, artikel ini menegaskan bahwa dinamika hubungan RI—RRT lebih tepat dipahami melalui perspektif kesinambungan historis daripada asumsi perubahan kebijakan yang bersifat drastis dan memutus kesinambungan dengan pola sebelumnya,

- Kontribusi utama artikel terletak pada integrasi analisis sejarah dan kerangka konseptual hubungan internasional, serta penyajian perspektif Indonesia-sentris dalam membaca kebangkitan Tiongkok dan posisi negara menengah dalam tatanan global multipolar.

## **Pendahuluan**

Hubungan Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok (RI–RRT) merupakan salah satu relasi bilateral yang paling kompleks dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, dinamika hubungan ini ditandai oleh perubahan yang signifikan, mulai dari periode kedekatan ideologis pada masa awal Perang Dingin, kebekuan diplomatik yang panjang pasca-peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965, hingga fase normalisasi dan penguatan kerja sama strategis sejak akhir 1980-an. Kompleksitas tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor bilateral, melainkan juga oleh perubahan politik domestik Indonesia serta pergeseran struktur sistem internasional. Dinamika global dari Perang Dingin menuju era pasca-Perang Dingin dan kini kecenderungan menuju multipolaritas turut membentuk persepsi, kepentingan, dan pilihan kebijakan kedua negara. Berlandaskan itu, relasi RI–RRT tidak dapat dipahami secara statis, melainkan sebagai hasil interaksi berlapis

antara konteks domestik, regional, dan global yang terus berkembang.<sup>1</sup>

Tahun 2025 menghadirkan konteks yang krusial untuk melakukan refleksi historis atas hubungan RI–RRT, seiring dengan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia. Transisi ini berlangsung dalam situasi internasional yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, fragmentasi ekonomi global, serta melemahnya tata kelola internasional berbasis liberal. Dalam literatur hubungan internasional, pergantian kepemimpinan sering dipahami sebagai momen yang membuka peluang bagi perubahan orientasi kebijakan luar negeri. Namun, kajian historis terhadap kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan pola yang relatif konsisten, di mana prinsip-prinsip dasar dan orientasi strategis cenderung bertahan melampaui perubahan rezim dan figur kepemimpinan. Sebagaimana diungkapkan oleh Leifer maupun Weatherbee, untuk

---

<sup>1</sup> Amitav Acharya, *The end of American world order (2<sup>nd</sup> Ed.)*, (Polity Press, 2018); G. John Ikkenberry, *A world safe for democracy: Liberal internationalism and the crises of global order*, (Yale University Press, 2020); R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas, *Diplomasi tanpa kehilangan muka: peran konsep "Mianzi" di balik normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia tahun 1990*, (Serat Alam Media, 2015); Jürgen Rüländ, *The geopolitics of democracy in Southeast Asia*, (Oxford University Press, 2022); Rizal Sukma, "Indonesia's foreign policy: Change and continuity." dalam Richard Robinson (Ed.), *Routledge handbook of Southeast Asian politics*, (Routledge, 2012): pp. 113–127.

memahami hubungan RI–RRT pada periode transisi lebih tepat menggunakan pendekatan historis yang menekankan kesinambungan dan adaptasi, dibandingkan dengan mengasumsikan perubahan yang bersifat mendadak dan drastis.<sup>2</sup>

Bertolak dari latar belakang historis dan konteks struktural global yang telah diuraikan di atas, artikel ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana hubungan RI–RRT pada tahun 2025 dalam lintasan historis kebijakan luar negeri Indonesia? Apakah terjadi perubahan substantif dalam kebijakan luar negeri Indonesia? Kedua pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya peran Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, baik melalui inisiatif ekonomi, diplomasi, maupun keamanan, yang turut membentuk lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa relasi Indonesia–Tiongkok merepresentasikan bentuk adaptasi kebijakan yang berlangsung dalam kerangka kesinambungan historis dan tidak memandang dinamika hubungan RI–RRT pada tahun 2025 sebagai titik keterputusan atau ruptura dalam kebijakan luar negeri Indonesia pasca-normalisasi.

---

<sup>2</sup> Michael Leifer, *Indonesia's foreign policy (1<sup>st</sup> Ed.)*, (Allen & Unwin, 1983); Donlad E. Weatherbee, *International relations in Southeast Asia: The struggle for autonomy (2<sup>nd</sup> Ed.)*. (Rowman & Littlefield, 2005).

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis digunakan untuk memahami perubahan kebijakan yang terjadi sebagai penyesuaian strategis terhadap konteks eksternal dan domestik yang berubah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang telah teruji lintas rezim. Perspektif sejarah menjadi krusial untuk menghindari pembacaan yang ahistoris dan reaktif terhadap dinamika kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih seimbang dalam menilai hubungan RI–RRT, terutama dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional, kontinuitas orientasi diplomatik Indonesia, serta tantangan global yang semakin kompleks pada dekade ketiga abad ke-21. Analisis dilakukan melalui penelusuran periodisasi historis dan pembacaan kontekstual untuk mengaitkan dinamika domestik dengan perubahan lingkungan internasional. Konsep *strategic hedging* digunakan secara terbatas sebagai alat bantu interpretatif untuk menjelaskan praktik diplomasi Indonesia yang cenderung menghindari keberpihakan strategis yang kaku.<sup>3</sup> Dengan posisi analitis yang Indonesia-sentris, artikel ini bertujuan menghadirkan refleksi historiografis atas hubungan RI–RRT, tanpa

---

<sup>3</sup> Cheng-Chwee Kuik, “Asymmetry and Authority: Theorizing Southeast Asian Responses to China’s Belt and Road Initiative,” *Asian Perspective* 45(2), (2021): pp. 255-276.

dimaksudkan sebagai evaluasi normatif atas efektivitas kebijakan luar negeri.

### **Lintasan Historis Hubungan RI–RRT**

Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Tiongkok dibuka pada tahun 1950, tidak lama setelah berdirinya RRT dan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Pada dekade 1950-an, relasi kedua negara berkembang dalam kerangka solidaritas Asia–Afrika dan semangat anti-imperialisme yang menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Peran Indonesia dan kehadiran Tiongkok dalam Konferensi Asia–Afrika 1955 di Bandung sering dipandang sebagai simbol kedekatan ideologis dan politik di antara negara-negara Dunia Ketiga yang berupaya menegosiasikan posisi otonom di tengah rivalitas Perang Dingin.<sup>4</sup> Kedekatan hubungan kedua negara di era itu dapat disebut sebagai kedekatan ideologis ala Soekarno. Kendati demikian, studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa bahkan pada fase ini, hubungan Indonesia–Tiongkok tidak sepenuhnya bersifat ideologis, melainkan dibatasi oleh pertimbangan domestik Indonesia, termasuk dinamika politik internal dan sensitivitas terhadap isu etnis Tionghoa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> David Mozingo, *Chinese policy toward Indonesia, 1949–1967*, (Cornell University Press, 1976).

<sup>5</sup> Muas, *Diplomasi tanpa kehilangan muka*; Kankan Xie, “Beyond ideology: China-Indonesia engagement in the 1950s,” *Journal of*

Perubahan terjadi pasca-peristiwa G30S/1965, yang menjadi titik krusial dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok. Tuduhan keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa G30S dan jatuhnya pemerintahan Sukarno mendorong rezim Orde Baru untuk membekukan hubungan diplomatik dengan RRT pada 1967. Selama lebih dari dua dekade, Tiongkok diposisikan sebagai ancaman ideologis dan keamanan, sejalan dengan orientasi antikomunis Orde Baru dan kedekatan Indonesia dengan Barat.<sup>6</sup> Periode pembekuan hubungan diplomatik pasca-1965 menjadi titik disrupsi utama dalam hubungan Indonesia–Tiongkok. Dalam menelaah fase ini dan dampaknya, menurut Muas, persoalan utama dalam hubungan kedua negara bukan semata konflik ideologis, melainkan keruntuhan kepercayaan yang diperparah oleh sensitivitas simbolik dan persepsi ancaman politik.<sup>7</sup> Pembekuan hubungan pada 1967 tidak hanya mencerminkan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga membentuk memori historis yang membatasi ruang kedekatan diplomatik di masa-masa berikutnya.

---

*Indonesian Social Sciences and Humanities (JISSH)*, Vol. 6, Issue 1, (2016): pp. 25–38.

<sup>6</sup> Charles A. Coppel, *Studying ethnic Chinese in Indonesia*, (Singapore Society of Asian Studies, 2002); Muas, “*Diplomasi tanpa kehilangan muka*”.

<sup>7</sup> Muas, *Diplomasi tanpa kehilangan muka*.

Normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1990 menandai berakhirnya fase keterputusan tersebut, tetapi tidak serta-merta menghapus memori historis yang terbentuk selama Orde Baru. Normalisasi ini berlangsung dalam konteks internasional yang berubah, ditandai oleh meredanya ketegangan Perang Dingin dan meningkatnya pragmatisme ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kajian pasca-normalisasi menunjukkan bahwa keputusan Jakarta untuk membuka kembali hubungan dengan Beijing didorong oleh kalkulasi ekonomi dan geopolitik, bukan oleh perubahan ideologis yang mendasar.<sup>8</sup> Dengan kata lain, normalisasi mencerminkan adaptasi kebijakan dalam kerangka kesinambungan prinsip otonomi dan kehati-hatian, bukan sebuah ruptura historis.

Memasuki era Reformasi pasca-1998, hubungan kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Dipayungi oleh status kemitraan strategis sejak 2005 yang ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2013, Tiongkok muncul sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Kebangkitan ekonomi Tiongkok dipandang Indonesia sebagai peluang strategis

---

<sup>8</sup> Ahmad S. Zuhri, "Indonesia-China's diplomatic relations after normalization in 1990," *Proceedings of the International Seminar and Conference: The Golden Triangle (Indonesia-India-Tiongkok)*, (University of Wahid Hasyim Semarang, 2015).

dalam konteks globalisasi dan regionalisasi Asia Timur. Bahkan pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), hubungan Indonesia–Tiongkok semakin terfokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan, termasuk mengintegrasikan program “Indonesia Poros Maritim Dunia” dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas oleh Presiden Xi Jinping. Meskipun demikian, peningkatan kerja sama ekonomi tidak sepenuhnya diiringi oleh kedekatan politik dan keamanan yang setara. Isu Laut Cina Selatan (LCS), khususnya terkait Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Natuna, menjadi pengingat berkelanjutan akan batas-batas kerja sama dan pentingnya menjaga kedaulatan nasional.<sup>9</sup> Pola ini menunjukkan bahwa intensifikasi hubungan pasca-Reformasi tetap berada dalam kerangka kehati-hatian yang diwarisi dari pengalaman historis sebelumnya.

Memasuki dekade 2020-an, hubungan RI–RRT semakin dilekatkan pada dinamika global yang lebih luas, termasuk rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dan pergeseran menuju tatanan internasional yang multipolar. Indonesia, sebagai negara menengah, berupaya menghindari keterjebakan dalam polarisasi kekuatan besar dengan mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif. Dalam konteks ini, kerja sama dengan

---

<sup>9</sup> Rizal Sukma, “Indonesia and the South China Sea,” *Asian Survey*, 57(6), (2017): 1001–1024.

Tiongkok termasuk dalam proyek infrastruktur dan kerangka ekonomi regional, berjalan berdampingan dengan upaya diversifikasi hubungan eksternal dan penguatan peran Indonesia di ASEAN.<sup>10</sup> Sejumlah studi terbaru menegaskan bahwa pendekatan ini mencerminkan kesinambungan strategi jangka panjang Indonesia dalam menjaga ruang otonomi kebijakan luar negeri, alih-alih perubahan arah yang radikal.

### **Hubungan RI–RRT Era Presiden Prabowo**

Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Jokowi. Transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto tidak menandai perubahan fundamental dalam arah hubungan Indonesia–Tiongkok, melainkan memperlihatkan kesinambungan kebijakan yang dilembagakan secara institusional. Hal itu antara lain terlihat dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang menegaskan bahwa Tiongkok tetap merupakan “mitra strategis komprehensif” Indonesia, terlepas dari pergantian kepemimpinan nasional.<sup>11</sup> Pada fase awal

---

<sup>10</sup> Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia in ASEAN: Foreign policy and regionalism*, (Institute of Southeast Asian Studies, 1994); Kuik, “Asymmetry and Authority”.

<sup>11</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Keterangan Pers Tentang Kerja Sama Maritim RI-Tiongkok Dalam Pernyataan Bersama RI-Tiongkok,” 11 November 2024, tersedia daring <https://kemlu.go.id/berita/keterangan-pers-tentang--kerja-sama->

pemerintahannya, Prabowo juga menekankan prinsip keberlanjutan kebijakan luar negeri dalam pidato kenegaraan dan pernyataan publiknya, termasuk komitmen terhadap kerja sama regional dan multilateralisme.<sup>12</sup> Posisi RRT sebagai prioritas juga terlihat dari dipilihnya Beijing sebagai tujuan pertama dalam lawatan ke luar negeri perdana Presiden Prabowo pada bulan November 2024. Sebagaimana dinyatakan Weatherbee, dalam konteks transisi kekuasaan, tindakan simbolik seperti kunjungan bilateral awal sering digunakan untuk menegaskan arah kebijakan luar negeri yang berkelanjutan.<sup>13</sup>

Nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pihak di akhir kunjungan perdana itu sempat membuat publik di Indonesia gonjang-ganjing. Polemik bersumber dari frasa “klaim tumpang tindih” yang dianggap menimbulkan ambiguitas dalam posisi Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam menghadapi polemik tersebut, pemerintah

---

[maritim-ri-tiongkok-dalam--pernyataan-bersama-ri-tiongkok?type=publication](#) (diakses 23 Januari 2026).

<sup>12</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029,” 20 Oktober 2024, tersedia daring

[https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato\\_presiden\\_prabowo\\_subianto\\_pada\\_sidang\\_paripurna\\_mpr\\_ri\\_dalam\\_rangka\\_pelantikan\\_presiden\\_dan\\_wakil\\_presiden\\_ri\\_terpilih\\_periode\\_2024\\_2029](https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_prabowo_subianto_pada_sidang_paripurna_mpr_ri_dalam_rangka_pelantikan_presiden_dan_wakil_presiden_ri_terpilih_periode_2024_2029) (diakses 23 Januari 2026).

<sup>13</sup> Weatherbee, *International relations in Southeast Asia*.

Prabowo memilih jalur klarifikasi melalui saluran diplomatik formal dan pernyataan resmi daripada pembatalan terbuka atau eskalasi konfrontatif. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui klaim historis yang tidak sesuai dengan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), seraya mengedepankan penyelesaian hukum internasional.<sup>14</sup> Respons struktural ini menunjukkan kematangan diplomasi Indonesia, yakni menegaskan posisi hukum nasional sekaligus menjaga hubungan pragmatis dengan Beijing. Di sisi lain, hal itu memperlihatkan pendekatan pemerintahan Prabowo yang pragmatis namun tetap terukur dan tegas dalam menanggapi isu geopolitik yang sensitif. Pendekatan semacam ini konsisten dengan prinsip bebas aktif Indonesia, di mana kepentingan strategis nasional tetap dijaga tanpa mengorbankan stabilitas regional.<sup>15</sup>

Sikap pragmatis dan terukur Prabowo juga tampak dalam intensitas diplomasi luar negeri yang kuat sepanjang 2025. Presiden Prabowo tercatat melakukan puluhan kunjungan ke berbagai negara dan forum internasional, termasuk sidang tingkat tinggi di PBB, BRICS Summit di Brasil, dan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Belgia, Prancis,

---

<sup>14</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Keterangan Pers Tentang Kerja Sama Maritim RI-Tiongkok”.

<sup>15</sup> Marty Natalegawa, *Does ASEAN matter? A view from within*, (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2018).

dan Belarus. Hal itu dapat jadi petunjuk adanya upaya diversifikasi hubungan luar negeri yang tidak hanya fokus pada satu kekuatan besar.<sup>16</sup> Kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro menegaskan posisinya sebagai anggota aktif yang berupaya membangun solidaritas *Global South* dan mendorong reformasi tata kelola global. Strategi ini mencerminkan diplomasi yang responsif terhadap dinamika global, bersikap tegas terhadap isu kedaulatan nasional, namun pragmatis dan terukur dalam memperluas jejaring kemitraan strategis.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing pada 3 September 2025 juga sangat monumental. Tidak saja karena hanya berlangsung sekitar delapan jam, tetapi juga karena dilakukan di tengah situasi domestik yang kurang kondusif sehingga Prabowo sempat membatalkan rencana kunjungan tersebut. Kunjungan untuk menghadiri peringatan kemenangan RRT atas Jepang itu memiliki makna kebijakan yang signifikan. Dalam pernyataan resmi pasca kunjungan, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kesinambungan kemitraan strategis Indonesia–Tiongkok, khususnya di bidang

---

<sup>16</sup> ANTARA, “BRICS Summit: Prabowo to voice Indonesia's role as bridge builder,” 6 Juli 2025, tersedia daring <https://en.antaranews.com/news/364429/brics-summit-prabowo-to-voice-indonesias-role-as-bridge-builder> (diakses 23 Januari 2026).

investasi, energi hijau, dan stabilitas kawasan.<sup>17</sup> Kehadiran Prabowo di Beijing mengirimkan sinyal kuat bahwa Tiongkok tetap menjadi prioritas diplomatik tingkat tinggi. Durasi kunjungan yang singkat tidak mencerminkan penurunan prioritas, melainkan penyesuaian gaya diplomasi yang lebih ringkas dan fungsional.

### **Hubungan RI–RRT pada Tahun 2025**

Pada tahun 2025, keterlibatan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok tetap menjadi dimensi paling menonjol dalam hubungan bilateral. Tiongkok mempertahankan posisinya sebagai salah satu mitra dagang dan investor utama Indonesia, khususnya dalam sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Dari perspektif *hedging*, keterlibatan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh kebangkitan Tiongkok, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional. Namun, sebagaimana terlihat dalam dekade-dekade sebelumnya, keterlibatan ekonomi tersebut tidak diiringi oleh penerimaan tanpa syarat terhadap kepentingan strategis Tiongkok. Indonesia tetap

---

<sup>17</sup> Presiden Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Rangkaian Kunjungan Kerja di Tiongkok,” 3 September 2025, tersedia daring <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-kembali-ke-tanah-air-usai-rangkaian-kunjungan-kerja-di-tiongkok/> (diakses 23 Januari 2026).

menegaskan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, terutama dalam isu-isu yang bersinggungan dengan keamanan dan wilayah.

Dimensi kehati-hatian paling jelas tercermin dalam sikap Indonesia terhadap LCS. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama, insiden berulang di sekitar perairan Natuna menunjukkan bahwa isu ini tetap menjadi sumber ketegangan struktural dalam hubungan RI–RRT. Pada 2025, Indonesia mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri yang konsisten dalam menghadapi dinamika LCS dengan menolak klaim historis Tiongkok yang tidak sejalan dengan UNCLOS, sambil secara simultan menghindari eskalasi militer maupun retorika konfrontatif. Sikap ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional serta prinsip penyelesaian damai sengketa maritim. Pendekatan tersebut mencerminkan kesinambungan doktrin bebas aktif yang menempatkan kepentingan nasional Indonesia, khususnya kedaulatan dan stabilitas maritim tanpa harus terlibat dalam rivalitas strategis kekuatan besar. Dalam konteks meningkatnya ketegangan regional, Indonesia juga memanfaatkan diplomasi ASEAN dan mekanisme multilateral sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas kawasan.<sup>18</sup> Posisi Indonesia tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga berfungsi sebagai penggagas norma

---

<sup>18</sup> Ian Storey, *The South China Sea Dispute in 2020-2021*, (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020).

(*norm entrepreneur*) yang mendorong tata kelola maritim berbasis aturan di Asia Tenggara.<sup>19</sup>

Pergantian kepemimpinan nasional Indonesia pada akhir 2024 sering diasosiasikan dengan potensi penyesuaian kebijakan luar negeri. Namun, analisis historis menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan di Indonesia jarang menghasilkan pergeseran strategis yang drastis dalam relasi dengan Tiongkok. Sejak Orde Baru hingga era Reformasi, orientasi dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif, otonom, serta non-aliansi formal menunjukkan tingkat institusionalisasi yang tinggi.<sup>20</sup> Dalam kerangka ini, kebijakan terhadap Tiongkok pada 2025 lebih tepat dipahami sebagai adaptasi kebijakan dalam batas-batas struktur yang telah ada, bukan sebagai inisiatif personal atau ideologis dari kepemimpinan baru.

Selain itu, praktik *strategic hedging* Indonesia pada 2025 juga tercermin dalam upaya diversifikasi hubungan eksternal. Di tengah intensifikasi kerja sama dengan Tiongkok, Indonesia tetap memperkuat hubungan dengan aktor-aktor lain, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan mitra regional di ASEAN. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar sekaligus memperluas ruang

---

<sup>19</sup> Natalegawa, *Does ASEAN matter?*; Kuik, "Asymmetry and Authority".

<sup>20</sup> Anwar, *Indonesia in ASEAN*; Leifer, *Indonesia's foreign policy*.

manuver diplomatik. Dalam perspektif historiografis, strategi diversifikasi ini bukanlah fenomena baru, melainkan kelanjutan dari upaya Indonesia sejak era awal kemerdekaan untuk mempertahankan otonomi di tengah persaingan kekuatan besar.<sup>21</sup> Konteks global pada 2025 yang ditandai oleh fragmentasi ekonomi, pelemahan institusi multilateral, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik justru memperkuat relevansi pendekatan *hedging* bagi Indonesia. Ketidakpastian tersebut mendorong negara-negara menengah untuk menghindari komitmen strategis yang kaku dan menjaga fleksibilitas kebijakan.

Dalam hubungan dengan Tiongkok, Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penerima dampak dari rivalitas global, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif menegosiasikan posisinya. Hal ini terlihat dari konsistensi Indonesia dalam menekankan sentralitas ASEAN dan multilateralisme sebagai kerangka utama pengelolaan hubungan dengan Tiongkok. Analisis hubungan RI–RRT pada 2025 menegaskan argumen utama artikel ini, bahwa dinamika kontemporer hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok lebih tepat dibaca sebagai kesinambungan strategis daripada ruptura historis. *Strategic hedging* berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana Indonesia, sebagai negara menengah, terus menavigasi hubungan dengan Tiongkok di tengah

---

<sup>21</sup> Weatherbee, *International relations in Southeast Asia*.

perubahan kepemimpinan nasional dan tantangan global yang semakin kompleks.

### **Penutup**

Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2025 merepresentasikan fase konsolidasi strategis yang paling matang sejak normalisasi hubungan diplomatik pada 1990. Alih-alih mencerminkan pergeseran arah kebijakan yang mendasar, dinamika hubungan pada periode ini justru menunjukkan pematangan institusional, di mana kerja sama ekonomi, politik, dan diplomatik dikelola dalam kerangka yang semakin stabil dan terlembaga. Pergantian kepemimpinan nasional dan meningkatnya kompleksitas geopolitik global tidak menghasilkan ruptura historis, melainkan memperkuat kecenderungan adaptif yang telah lama menjadi ciri kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, hubungan RI–RRT pada 2025 lebih tepat dipahami sebagai kelanjutan historis yang mencapai tingkat konsolidasi strategis yang relatif mapan.

Secara substantif, pola hubungan RI–RRT pada 2025 memperlihatkan kesinambungan praktik diplomasi Indonesia yang ditandai oleh kehati-hatian, fleksibilitas, dan pengelolaan ambivalensi strategis. Sejak normalisasi hubungan, Indonesia secara konsisten memosisikan Tiongkok sebagai mitra penting yang menawarkan peluang ekonomi signifikan sekaligus membawa

implikasi politik dan keamanan yang tidak dapat diabaikan. Persepsi ganda ini membentuk pendekatan diplomasi yang menolak keberpihakan strategis yang kaku serta menempatkan otonomi kebijakan luar negeri sebagai prinsip utama. Bahkan dalam konteks peningkatan kerja sama ekonomi dan ketergantungan struktural, Indonesia tetap menjaga batas normatif yang jelas, terutama dalam isu kedaulatan dan hukum laut, sehingga keterlibatan dengan Tiongkok tidak berkembang menjadi relasi yang bersifat subordinatif.

Dalam kerangka analitis, konsep *strategic hedging* berguna untuk menjelaskan arah diplomasi Indonesia pada 2025, khususnya dalam mengombinasikan keterlibatan pragmatis dengan kehati-hatian keamanan dan diversifikasi hubungan eksternal. Namun, artikel ini menegaskan bahwa *strategic hedging* tidak menciptakan arah kebijakan baru, melainkan memberi bahasa konseptual bagi praktik diplomasi yang telah terbentuk secara historis. Pragmatisme Indonesia terhadap RRT dapat dipertahankan selama dijalankan secara terukur dan disertai ketegasan normatif, terutama dalam hal kedaulatan dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan demikian, stabilitas relatif hubungan RI–RRT pada 2025 mencerminkan keberhasilan Indonesia mengelola relasi dengan kekuatan besar tanpa mengorbankan prinsip dasar kebijakan luar negerinya.

